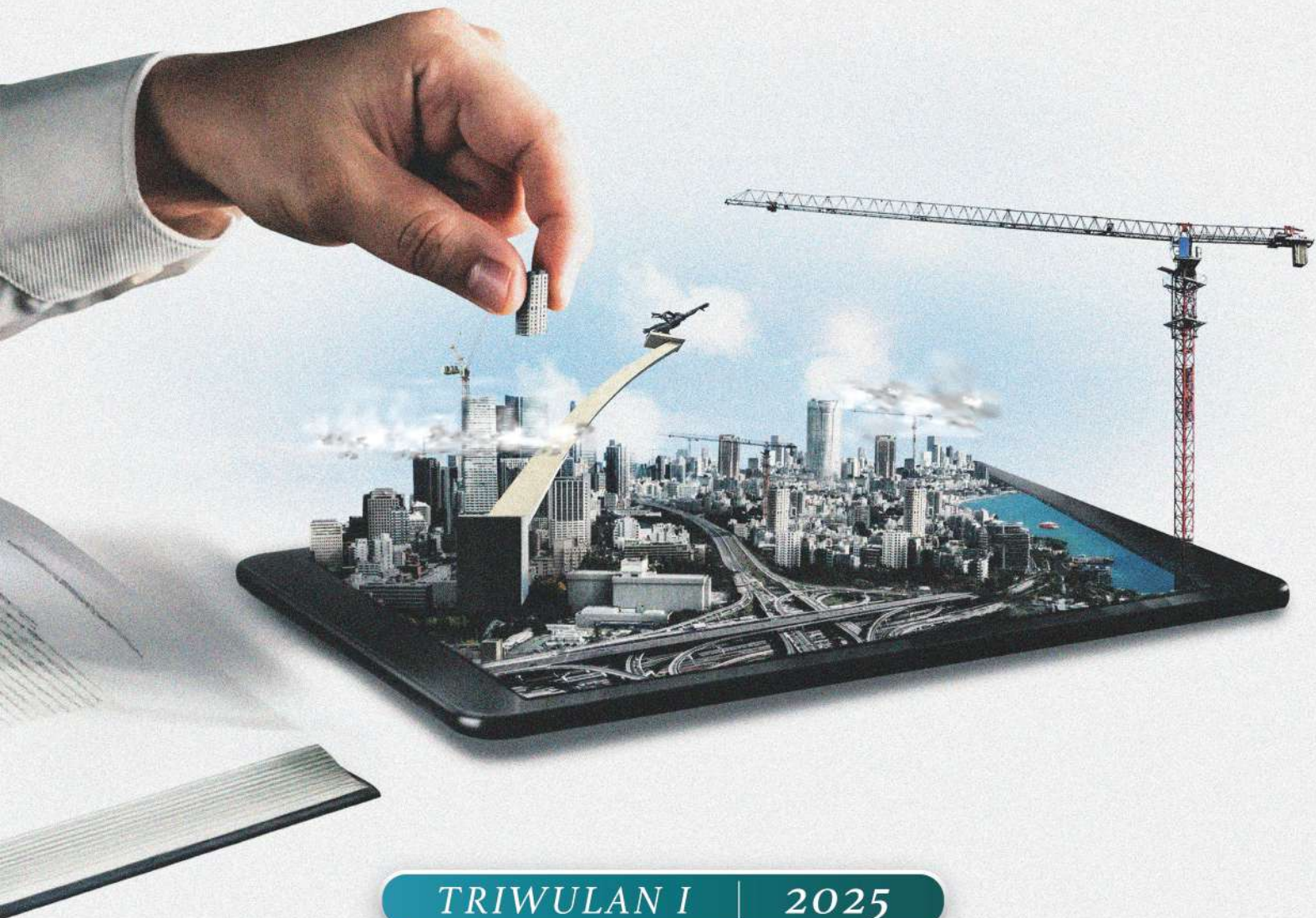




LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN I | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan
Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Iin Maelani, S. Kom	Penyusun Bahan Rencana dan Pelaporan	8 / 09 / 2025	
2.	Dikonsep	Rizki Azkiya, S. Pd	Pengadministrasi Umum	8 / 09 / 2025	
3.	Diperiksa	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	9 / 09 / 2025	
4.	Disetujui	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	9 / 09 / 2025	
5.	Disetujui	Ir. Marvian Dwi Surya Putra, S.SiT., M.M	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan	10 / 09 / 2025	
6.	Disetujui	Dony Prasetio, S.ST	Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	9 / 09 / 2025	
7.	Disetujui	Dwi Hari Yulisetianto, S.SiT, M.Sc	Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	10 / 09 / 2025	



Kata Sambutan

Kata Sambutan



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025.

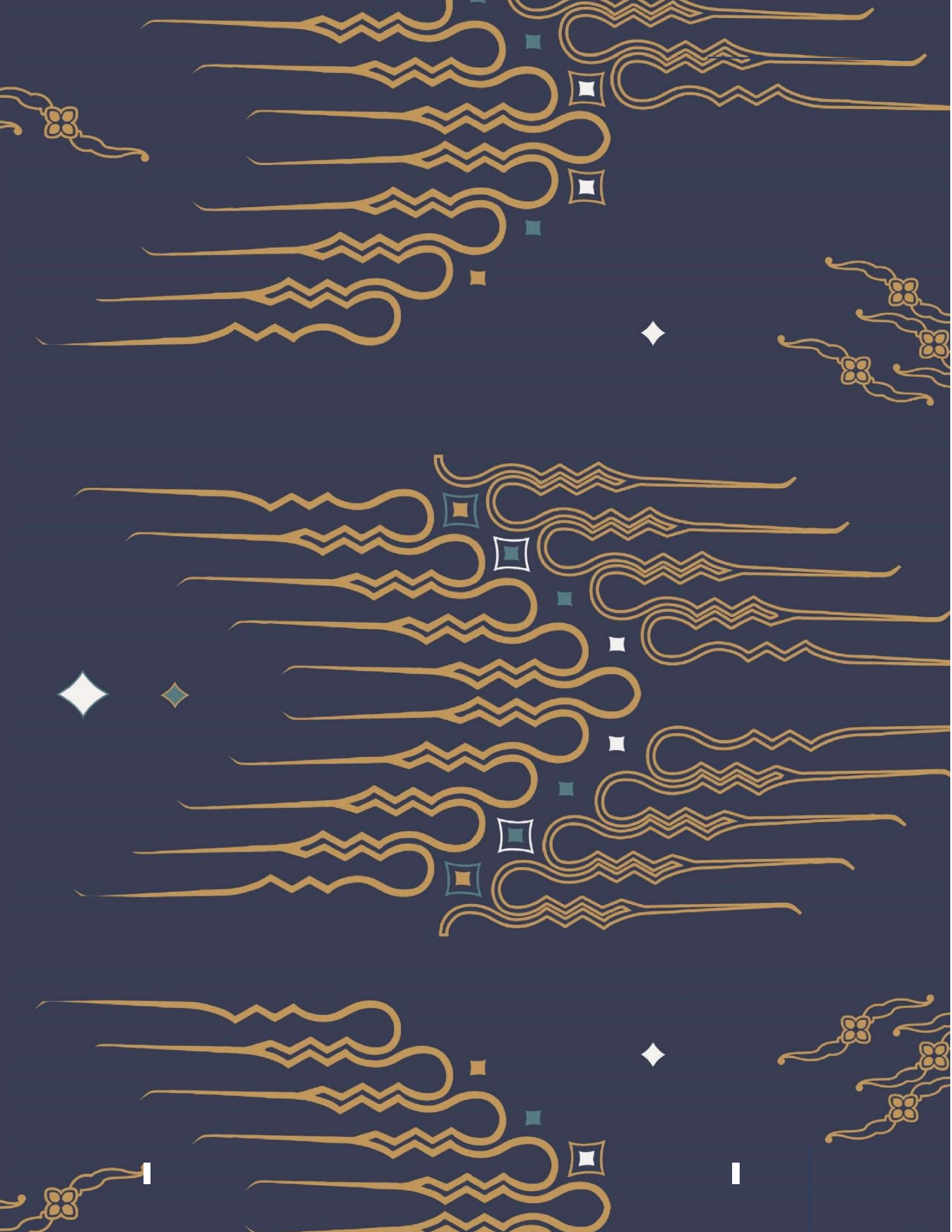
Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Banjar, 11 April 2025

Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan



SIGIT MINTARSO



Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025-2029 mengusung Visi dan misi “Terwujudnya komitmen untuk membangun sinergi dan disiplin dalam menjalankan pemerintahan”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2025-2029. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2025-2029, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Renstra memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat
4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
5. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sudah baik.

Dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2025, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 9,30% (target 100%) tercapai 9,30% ;
2. Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 100%;
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 25% (target 100%) tercapai 25%;
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 100%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 67,46% (target 80%) tercapai 84,33%;
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 56,13% (target 80%) tercapai 70,16%;
7. Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 0% (target 100%) tercapai 0%;
8. Jumlah Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 11,97% (target 40%) tercapai 170%;
9. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 orang (target 1250) tercapai 0%;
10. Persentase Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 0% (target 95%) tercapai 0%;
11. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 0 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 0%;
12. Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 80 (target senilai 88) tercapai 90,90%;
13. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 76,62 (target senilai 83) tercapai 92,31%;

dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

halaman Persetujuan.....	iv
Kata Sambutan	vi
Ringkasan Eksekutif	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
I.3 Sumber Daya Manusia	4
I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	5
I.5 Sistematika Laporan	6
I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	10
I.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.....	12
I.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
BAB II CAPAIAN KINERJA.....	15
II.1TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	15
II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	16
IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional.....	20
a.1. Definisi Indikator Kinerja.....	20
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	21
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	22
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	24
IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.....	25
a.1. Definisi Indikator Kinerja.....	25
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025.	25
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	26
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	29
IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.....	30
a.1. Definisi Indikator Kinerja.....	30
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	30
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	31
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	34
IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	34
a.1. Definisi Indikator Kinerja.....	34

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	35
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	36
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	38
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.....	38
IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	38
a.1. Definisi Indikator Kinerja	38
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	39
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	40
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	42
IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	42
a.1. Definisi Indikator Kinerja	42
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	42
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	43
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	47
IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	48
a.1. Definisi Indikator Kinerja	48
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	49
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	50
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	51
IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	52
a.1. Definisi Indikator Kinerja	52
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	52
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	53
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	55
IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	55
a.1. Definisi Indikator Kinerja	55
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	55
a.3. Analisa Keberhasila dan/Kegagalan	56
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	58
IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	58
a.1. Definisi Indikator Kinerja	58
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	59
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	60
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	62
IKK7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	62
a.1. Definisi Indikator Kinerja	62

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	62
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	63
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	65
IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	66
a.1. Definisi Indikator Kinerja	66
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	68
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	69
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	73
IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	74
a.1. Definisi Indikator Kinerja	74
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025	74
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	75
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	77
II.3 REALISASI ANGGARAN	78
II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025	78
II.3.1.1 Pagu Anggaran	78
II.3.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2025	80
II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2025	83
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	85
II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	85
II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	86
II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025	87
II.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja	89
II.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	91
II.5 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)	92
II.6 Hambatan dan Kendala	93
BAB IIIPENUTUP	94
III.1 Ringkasan Capaian	94
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	96

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi SDM Pegawai BPTD Kelas II Kalsel.....	4
Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025 -2029.....	10
Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	12
Tabel I.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
Tabel II.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	19
Tabel II.2 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025.....	78
Tabel II.3 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025.....	78
Tabel II.4 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2025.....	80
Tabel II.5 Rincian Revisi Per Jenis Belanja T.A. 2025.....	80
Tabel II.6 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2025.....	81
Tabel II.7 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A 2025.....	82
Tabel II.8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2025 Triwulan I.....	83
Tabel II.9 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA 2025	85
Tabel II.10 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja triwulan I Tahun 2025.....	86
Tabel II.11 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I 2025.....	87
Tabel II.12 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	89
Tabel II.13 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025.....	89
Tabel II.14 Rincian sisa Anggaran Tahun 2025.....	90
Tabel II.15 Efisiensi anggaran.....	91
Tabel II.16 Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM.....	91
Tabel III.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggungjawab.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.....4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPTD Kelas II Kalsel 2025
Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubbag Tata Usaha BPTD Kelas II Kalsel 2025
Lampiran Perjanjian Kinerja Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Kalsel 2025
Lampiran Perjanjian Kinerja Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Kalsel 2025
Lampiran Perjanjian Kinerja Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan BPTD Kelas II Kalsel 2025
Lampiran Rencana Aksi 2025
Lampiran Monitoring Rencana Aksi Januari – Maret 2025
Data Dukung per Indikator Kinerja Kegiatan



Bab I

Pendahuluan

I.1 LATAR BELAKANG

I.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

I.2.1 Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 33 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

- a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe III;

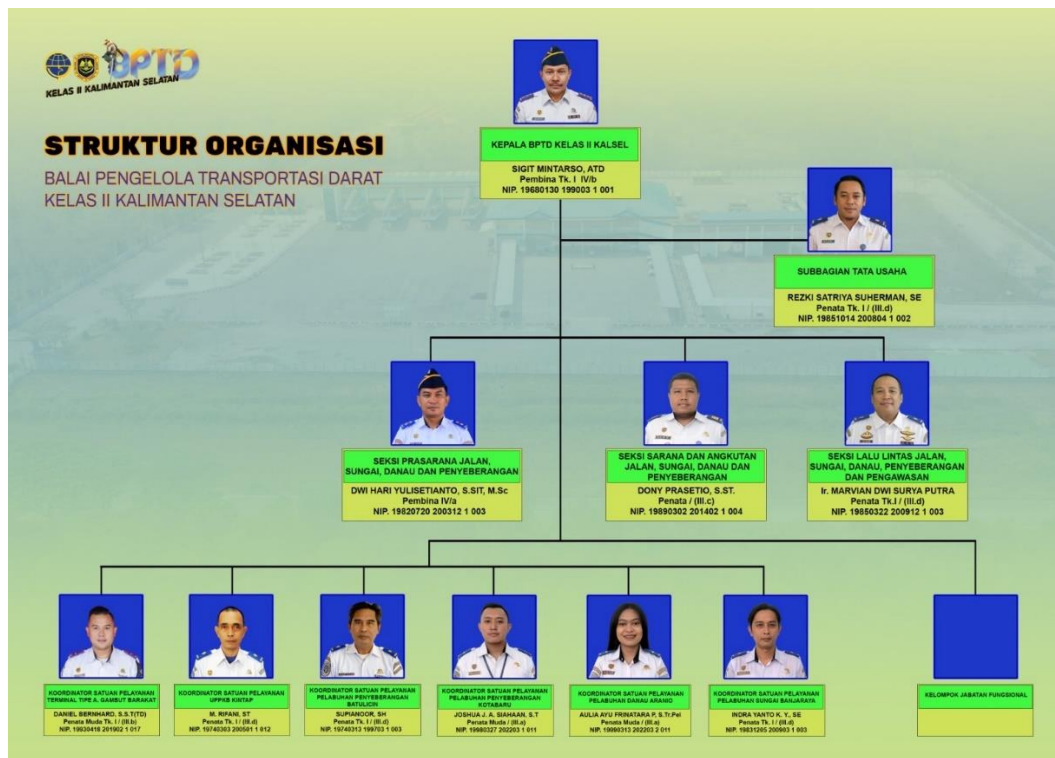
Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:
a. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan menaungi sebanyak 187 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

SDM PNS BPTD sebanyak : 62 orang

SDM CPNS BPTD sebanyak : 18 orang

SDM PPPK BPTD sebanyak : 4 orang

SDM PPNP BPTD Sebanyak : 103 orang

Tabel I.1 Komposisi SDM Pegawai BPTD Kelas II Kalsel

NO	NAMA	PNS	CPNS	PPPK	PPNP	TOTAL
1	KANTOR INDUK	34	5	1	38	78
2	SATPEL TERMINAL TIPE A GAMBUT BARAKAT	6	2	2	29	39
3	SATPEL PEL. PENYEBERANGAN BATULICIN	1	3	-	4	8
4	SATPEL PEL. PENYEBERANGAN KOTABARU	2	-	-	5	7
5	SATPEL PEL. DANAU ARANIO	3	1	-	3	7
6	SATPEL PEL. SUNGAI BANJARRAYA	6	-	-	5	11
7	SATPEL UPPKB KINTAP	8	1	1	11	21
8	SATPEL UPPKB TABALONG	2	6	-	8	16
JUMLAH		62	18	4	103	187

I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam TransportasiPenyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi BPTD.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan adalah:

1. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
2. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
3. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
4. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
5. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- I.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II CAPAIAN KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

BAB III PENUTUP

- III.1 Ringkasan Capaian
- III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

II.2.1 SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi

A.1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.2. IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

A.2.1. Definisi Indikator Kinerja

A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

A.3.1. Definisi Indikator Kinerja

A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

A.4.1. Definisi Indikator Kinerja

A.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat

B.1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A

B.1.1. Definisi Indikator Kinerja

B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP

B.2.1. Definisi Indikator Kinerja

B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK4 Meningkatnya Keselamatan transportasi darat

C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

C.1.1. Definisi Indikator Kinerja

C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.3. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan Transportasi Jalan

- C.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.4. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- C.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.5. IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

- C.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

D.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

- D.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

E.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- E.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- E.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2 Realisasi Anggaran

II.2.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Revisi Anggaran Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2025

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.4. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

II.3.5. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.2 Ringkasan Capaian

III.3 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Lain – lain yang dianggap perlu.

I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029

Tabel I. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2020-2024
1	SK1	Konektivitas Transportasi darat dan Keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2020-2024
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal tipe-A	%	80
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SDP	%	80
3	SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1250
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	1
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	88
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	83

1.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel I. 3 Rencana Kinerja Tahunan 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	80
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40

		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.250	
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1	
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan DaratAkuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83

1.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 69.067.331.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4

2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	80
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.250
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 12.150.246.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 4.117.593.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 21.635.882.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 13.496.560.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.647.028.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 11.020.022.000

BAB II CAPAIAN KINERJA

II.1TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasitersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

1) Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

2) Presentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3) Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

Tabel II.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	Q1		
				T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					58,57%
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	100	9,30	9,3%
IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	1	1	1	100%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	25	25%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4	4	4	100%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat					77,24%
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	80	80	67,46	84,33%
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	80	56,13	70,16%
SK4	Meningkatnya Keselamatan transportasi darat					34%
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	0	0%
IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40	40	11,97	170%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	orang	1250	1250	0	0%
IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	95	0	0%
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1	1	0	0%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					90,90%
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	88	88	80	90,90%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					92,31%
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	83	83	76,62	92,31%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						70,60
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						57,07
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						2
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						11

Selama tahun 2025, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 13 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan. Penjelasan capaian IKP untuk setiap Sasaran Program adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional
2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe - A dan terminal barang yang beroperasi
3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Juga merupakan Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat.

Adapun Keperintisan Angkutan Jalan Nasional yang dimaksud adalah penyelenggaraan penyediaan layanan angkutan umum DAMRI pada sejumlah trayek di wilayah daerah Kalimantan Selatan yang belum terdapat pelayanan angkutan umum disana. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan perekonomian warga pada trayek yang dilayani. Adapun data trayek yang dilayani pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel III.3.

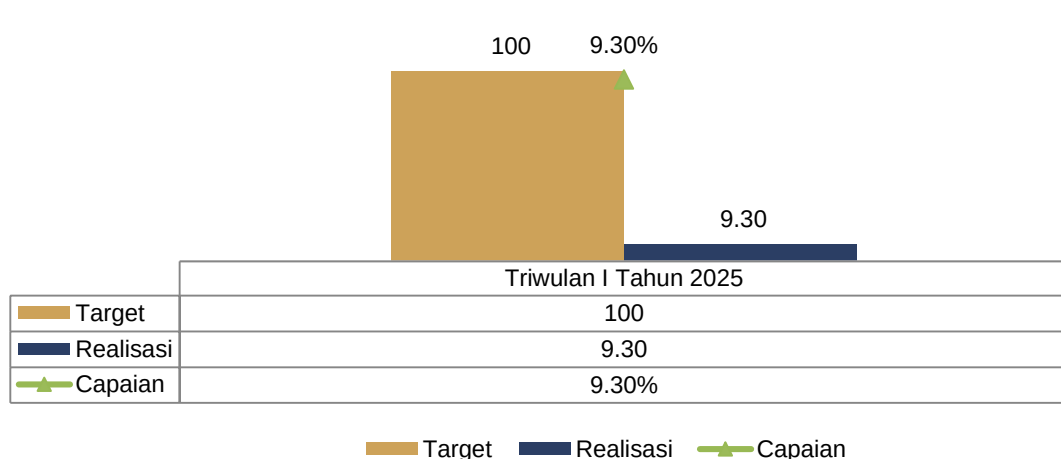
Tabel II. 3 Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025

No	Rincian Trayek	Jumlah Rit/Tahun	Jarak (km)
1	Terminal Gambut Barakat - Marabahan	230	66
2	Terminal Gambut Barakat - Terminal Rantau - Loksado	230	152
3	Kotabaru - Serongga - Batulicin	230	75
4	Terminal H.Soemarsono P.A - Pantai Takisung - Tabanio	230	44
5	Terminal H. Soemarsono P.A - Pantai Batakan	230	46
6	Terminal H. Soemarsono P.A - Jorong	230	43
Total		1.370	426

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel II.3, dapat diketahui bahwa untuk Tahun Anggaran 2025, terdapat 6 trayek yang dilayani pada Perum DAMRI yang ada di Kalimantan Selatan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan I tahun 2025 sebesar 9,30% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 9,30%.Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1.** Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional.



Gambar III.1. Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Kalsel

NO	Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target	100
2	Realisasi	9,30
3	Capaian	9,30%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Kalsel yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada triwulan I sebesar 9,30%. Sehingga capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 9,3%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 5958 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025, sebanyak 6 trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

• Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum;
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang murah dan efisien.
4. Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Terlambatnya kontrak kegiatan dikarenakan terdampak efisiensi anggaran di awal tahun 2025;
2. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan;
4. Makin maraknya pengelolaan kendaraan komersil dengan kemudahan aksesnya;
5. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pelaksanaan} \\ \text{keperintisan} \\ \text{angkutan jalan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Rit Realisasi pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Rit yg direncanakan}} \times 100\%$$

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan. Realisasi rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5 Realiasi Kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2025

No	Rincian Trayek	Jumlah Rit/Tahun	Jarak (km)	Total Realisasi s.d maret
1	Terminal Pelaihari - Pantai Takisung - Tabanio	230	19	19
2	Terminal Pelaihari - Pantai Batakan	230	20	20
3	Terminal Gambut Barakat - Marabahan	220	22	22
4	Terminal Gambut Barakat - Terminal Rantau - Loksado	230	23	23
5	Terminal Pelaihari - Jorong	230	20	20
6	Kotabaru - Serongga - Batulicin	230	23,5	23,5
Total		1.370	127,5	127,5

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{127,5}{1.370} \times 100\% = 9,30\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 adalah 9,3% dimana untuk menghasilkan persentase capaian yaitu realisasi dibagi target dikali 100 persen. Ini dapat diartikan bahwa kinerja terkait Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 mencapai target yang sempurna.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{9,30}{100} \times 100\% = 9,3\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2025 yaitu Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) Subsidi Oprasional Bus Perintis senilai Rp 4.833.463.000,- dengan realisasi di triwulan I Tahun 2025 Rp 2.413.751.600,- atau mencapai 49,94% dengan nomenklatur POK : Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional), kode anggaran (4637.QAH.001).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
2. Dapat terus mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum;
3. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat;
4. Dapat terus mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal;
5. Selalu menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum;
6. Dapat mewujudkan konektivitas transportasi darat.
7. Melakukan sosialisasi terkait trayek yang dilalui angkutan perintis bagi Pemda setempat dan juga masyarakat yang dijangkau oleh angkutan perintis tersebut.

IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 1 (satu) Satuan Pelayanan Terminal Tipe A yang beroperasi yaitu Terminal Tipe-A Gambut Barakat dan tidak memiliki Terminal Barang yang Beroperasi.

Terminal Tipe-A Gambut Barakat Merupakan Terminal Induk dimana merupakan terminal asal-tujuan yang terletak di Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lahan 4,8 ha dan luas Bangunan Terminal sebesar 3.417 M². Melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Perkotaan (ANGKOT).

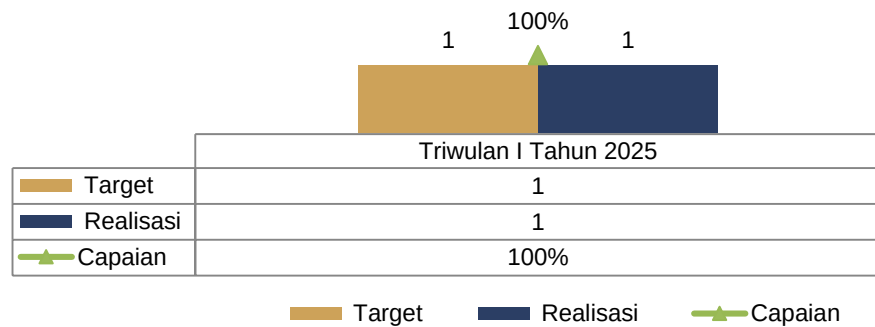
Terminal Tipe-A Gambut Barakat memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Fasilitas Utama | - Fasilitas Penunjang |
| a. Jalur Keberangkatan | a. Klinik |
| b. Jalur Kedatangan | b. Fasilitas Keamanan |
| c. Ruang Tunggu penumpang | c. Gerai ATM |
| d. Area Parkir Penjemput / Pengantar | d. Endapan Bus |
| e. Perlengkapan Jalan | e. Kios/Kantin |
| f. Loker Penjualan Tiket | f. Masjid |
| g. Pusat Informasi | g. Wifi |
| h. Media Informasi | h. Tempat bermain anak |
| i. Gedung Utama / Kantor Terminal | |
| j. Toilet Umum | |
| k. Gudang | |

Selanjutnya maksud dari IKK ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah terminal yang telah beroperasi di bawah naungan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2025.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Realisasi kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Triwulan I tahun 2025 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3**. Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.



Gambar III.3. Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi BPTD Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2025

Tabel II.9 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi
BPTD Kelas II Kalsel Tahun 2025

NO	Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target	1
2	Realisasi	1
3	Capaian	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi yang ditetapkan sebesar 1 lokasi. Realisasi Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada triwulan I sebesar 1 lokasi. Sehingga capaian Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, terhadap Operasional Pelayanan Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi pada tahun 2023 di Terminal tipe-A Gambut Barakat Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe-A;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 1 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2025 antara lain yaitu :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum
2. Informasi tentang pelayanan diterminal tersampaikan kepada masyarakat
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor

- **Faktor Kegagalan**

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2025 antara lain yaitu :

1. Kebersihan diterminal masih kurang maksimal
2. Lokasi jauh dari jalan utama
3. Fasilitas umum pada Terminal masih kurang memadai bagi pengguna layanan

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

IKK 1.3 = Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi
IKK 1.3 = 1 Lokasi

Tabel III. 10 Data Produksi Angkutan dan Penumpang Terminal Tipe-A Gambut Barakat Jan-Mar 2025

No	Bulan	AKAP				AKDP				TOTAL			
		Kedtg		Kebrkt		Kedtg		Kebrkt		Kedtg		Kebrkt	
		Kndr	Pnp	Kndr	Pnp	Kndr	Pnp	Kndr	Pnp	Knd	Pnp	Knd	Pnp
1	JANUARI	321	8938	339	7173	7905	64129	7905	63182	8226	73067	8244	70355
2	PEBRUARI	281	6466	284	5133	7395	60029	7365	59338	7676	66495	7649	64471
3	MARET	283	6260	303	5106	7905	64698	7905	63808	8188	70958	8208	68914
	JUMLAH	490	15245	487	10508	7650	62672	7650	62611	8140	77917	8137	73119

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk meramaikan terminal tipe-A Gambut Barakat dalam tahun 2025 sebagai berikut:

NO.	UPAYA YANG DILAKUKAN	TUJUAN	CAPAIAN
1.	Sosialisasi kepada PO yang masih melakukan penjualan tiket diluar terminal	Agar PO berkantor dan menjual tiket di dalam Terminal	Beberapa PO sudah melakukan kerjasama sewa loket di terminal
2.	Edukasi dan himbauan kepada penumpang dan masyarakat tentang aturan terminal	Menjadikan fungsi terminal sebagai tempat naik dan turunnya penumpang	Masyarakat mulai sadar memahami dan mematuhi aturan
3.	Penegakan hukum dan penindakan terhadap angkutan umum yang melanggar aturan	Menertibkan Angkutan Umum agar tertib dan masuk ke terminal	Masih banyak angkutan umum yang melakukan pelanggaran (tidak masuk ke terminal dan masih menurunkan penumpang di loket luar terminal)
4.	Promosi dan ekspos lingkup terminal lewat media social dan media cetak	Agar masyarakat mengetahui lingkup dan memfungsikan terminal	Postingan kegiatan terminal lewat facebook, Instagram dan TV Nasional.

Realisasi kinerja terhadap aspek sebagai indikator di Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Gambut Barakat sudah mencapai 100% (maksimal) di tiap tahunnya.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi tahun 2025 adalah 100% dimana untuk menghasilkan persentase capaian yaitu realisasi dibagi target dikali 100 persen. Ini dapat diartikan bahwa kinerja terkait Kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi mencapai target yang sempurna, sedangkan capaian terminal barang yang beroperasi saat ini BPTD Kelas II Kalsel belum memiliki terminal barang.

$$\frac{\text{Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi}}{\text{Target}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2025 yaitu Terminal Penumpang Tipe-A Operasional Terminal Tipe-A Gambut Barakat senilai Rp1.829.873.000,- dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp163.210.593,- atau mencapai 8,92% dengan nomenklatur POK : Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, kode anggaran (4638.CDP.040).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas terminal Tipe-A;
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang;
3. Meningkatkan minat Masyarakat agar lebih banyak menggunakan Transportasi Umum;
4. Meningkatkan pendapatan PNBP di Terminal Tipe-A.

IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah pelayanan angkutan penyeberangan bersubsidi guna membangun konektivitas antar pulau di Kalimantan Selatan. Pelayanan angkutan penyeberangan perintis menggunakan kapal ferry dari perusahaan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin. Kegiatan ini berguna untuk mendukung kegiatan perekonomian serta sosial politik masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.

Tabel III. 14 Lintas Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2025

No	Rincian Lokasi	Volume	Satuan	Capaian s.d Maret (KM)
1	Lintas Pulau Laut Timur – Pulau Sebuku.	680	Trip	680
Total		680	Trip	680

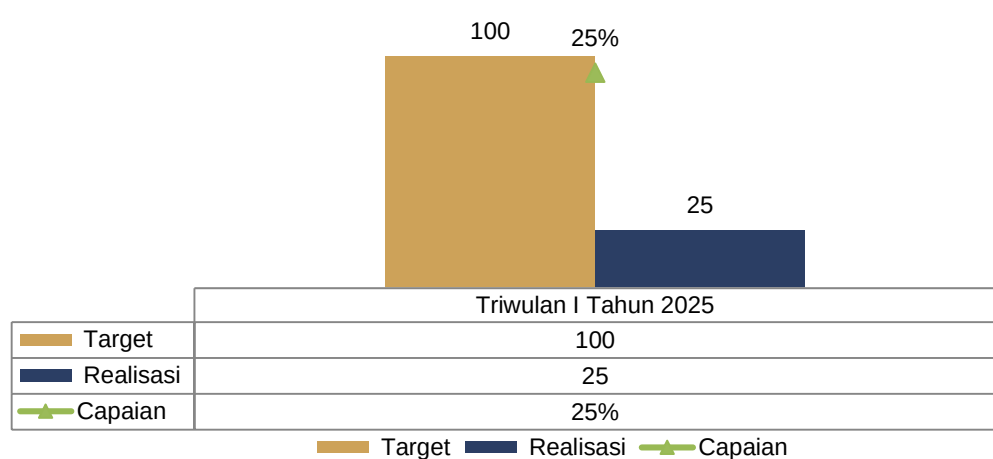
Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel III. 13, dapat diketahui bahwa untuk Tahun Anggaran 2025, terdapat 1 Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis yang dilayani pada PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin yang ada di Kalimantan Selatan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi Januari – Maret (Trip)}}{\text{Target Setahun (Trip)}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan I tahun 2025 sebesar 25 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 25%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.5**. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar III.5. Grafik Capaian IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

Berikut ini rincian capaian triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025.

Tabel II. 15 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025 BPTD Kelas II Kalsel

NO	Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target	100
2	Realisasi	25
3	Capaian	25%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa: Pada triwulan I, target Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan I sebesar 25. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 25%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 6837 Tahun 2024 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini ditetapkan dasar untuk pengawasan dan pelayanan terhadap operasional angkutan perintis Pelabuhan Penyeberangan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat;
2. Efisiensi waktu tunggu dengan waktu keberangkatan kapal;
3. Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir;
4. Kepastian jam operasioanal Keperintisan Angkutan Penyeberangan;
5. Satu-satunya pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang beroperasi melayani masyarakat Pulau Sebuku;
6. Memastikan jumlah ketersediaan kapal feri yang memadai sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
7. Kecakapan awak kapal yang telah mumpuni dibuktikan dengan adanya sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku;
8. Tersedianya ruang tunggu yang memadai untuk pengguna jasa ;
9. Pengecekan berkala fasilitas dalam kapal untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan penumpang;
10. Pengecekan berkala kondisi kapal melalui pemeriksaan SPM.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Jadwal Oprasional tidak Terlalu banyak;
2. Cuaca yang buruk, angin kencang dan ombak yang tinggi dapat menyebabkan penundaan keberangkatan kapal;
3. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan;
4. Pelabuhan penyeberangan perintis seringkali memiliki keterbatasan fasilitas, termasuk dermaga yang tidak memadai, area parkir yang terbatas, dan fasilitas penunjang lainnya yang minim.
5. Keterbatasan armada kapal yang tidak sebanding dengan jumlah lonjakan penumpang;
6. Keterbatasan jumlah petugas dan awak kapal;
7. Keterbatasan Ketersediaan Informasi terkait Jadwal dan pemesanan Tiket.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

No	Rincian Lokasi	Volume	Satuan	Capaian s.d Maret (KM)
1	Lintas Pulau Laut Timur – Pulau Sebuku.	680	Trip	170
Total		680	Trip	170

Dengan demikian Persentase Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip penyeberangan yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{170}{680} \times 100\% = 25\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2025 adalah 25%. Dimana persentase capaian merupakan hasil realisasi dibagi target. Yang mana nilai pada realisasi adalah 25% dibagi nilai target adalah 100% dan dikali 100 persen. Artinya Capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2025 berhasil mencapai target dengan sempurna.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{25}{100} \times 100\% = 25\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025 yaitu Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan senilai Rp4.316.783.000,- dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp1.764.897.000,- atau mencapai 40,88%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menghubungkan daerah yang belum memiliki moda transportasi lain secara memadai;
3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani pelayaran niaga;
4. Melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP yang telah dibuat;
5. Pemenuhan pengecekan berkala melalui SPM kapal penyeberangan pada lintasan perintis.
6. Perbaikan dan pengembangan fasilitas pelabuhan yang ada untuk mengakomodir arus penumpang dan kendaraan;
7. Penyediaan informasi yang mudah diakses oleh pengguna jasa terkait jadwal dan pemesanan tiket;
8. Memastikan tingkat kecakapan awak kapal penyeberangan perintis melalui pengecekan secara berkala sertifikat kompetensi yang dimiliki awak kapal;
9. Koordinasi yang baik antar pihak operator, Pemda dan BPTD dalam penetapan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting sangat penting;
10. Pengaturan Pola Arus Lalu Lintas penumpang dan kendaraan di pelabuhan untuk kelancaran layanan.

IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

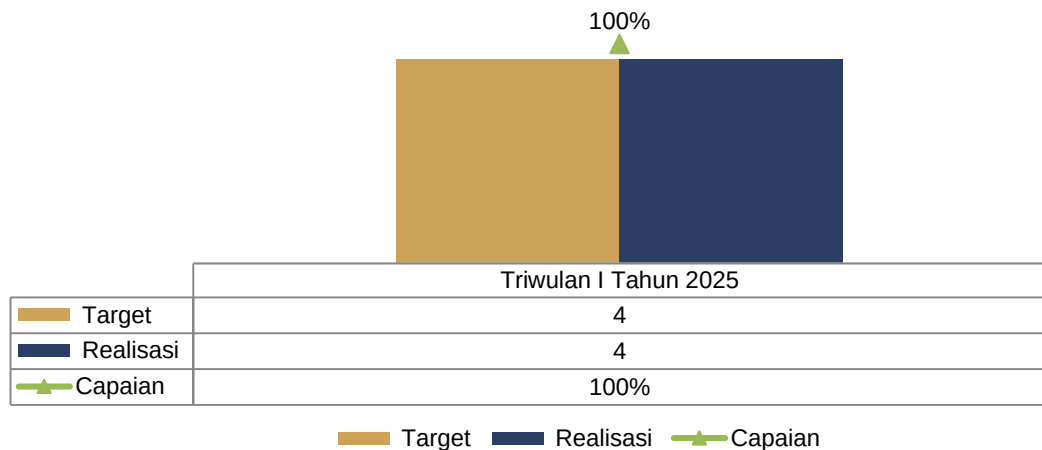
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki 4 (empat) Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang beroperasi dengan 13 (tigabelas) Wilayah kerja. Yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Pelabuhan SDP terhadap keselamatan transportasi angkutan umum berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan I tahun 2025 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 4 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.6**. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar III.6. Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

Berikut ini rincian capaian triwulan untuk Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2025 di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan.

Tabel II. 19 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan yang Beroperasi BPTD Kelas II Kalsel pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target	4
2	Realisasi	4
3	Capaian	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 4 lokasi. Realisasi jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada triwulan I sebesar 4 lokasi. Sehingga capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, dimana BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terdapat 4 (empat) Satuan Pelayanan SDP yang beroperasi dengan 13 wilayah kerja. Adapun Pelabuhan tersebut antara lain

NO	Satuan Pelayanan SDP	Wilayah Kerja	Dasar Hukum
1.	Penyeberangan Batulicin	- Penyeberangan Tanjung Serdang	PM 6 Tahun 2023
2.	Penyeberangan Kotabaru	- Penyeberangan Pulau Laut Timur - Penyeberangan Stagen - Penyeberangan Tarjun	PM 6 Tahun 2023
3.	Pelabuhan Sungai Banjaraya	- Pelabuhan Sungai Pasar Baru - Pelabuhan Sungai Ujung Murung - Pelabuhan Sungai Pasar Lima - Pelabuhan Sungai Alalak - Pelabuhan Sungai Jelapat	PM 6 Tahun 2023
4.	Pelabuhan Danau Aranio		PM 6 Tahun 2023

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 4 pelabuhan berdasarkan PM 6 Tahun 2023.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:
2. Petugas yang kompeten dibidangnya
3. Koordinasi dan kerjasama yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait
4. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja (performance evaluation) yang baik dan berkala untuk pelaksanaan kegiatan, sebagai instrumen pembantu untuk pengambilan keputusan
5. Infrastruktur pelabuhan yang memadai
6. Pelayanan yang berkualitas
7. Pengaturan jadwal kapal yang efektif dan efisien
8. Mutu sarana dan prasarana baik kapal maupun pelabuhan

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. SDM yang tidak memadai
2. Kerjasama dan koordinasi yang lemah antar stakeholder
3. Kurangnya pengawasan dan evaluasi
4. Infrastruktur yang tidak memadai
5. Pelayanan yang buruk
6. masih perlu peningkatan fasilitas kantor
7. Keadaan Alam Seperti pasang air laut yang sering terjadi di sekitar pelabuhan
8. Kerusakan pada kapal dan peralatan pelabuhan
9. Human error (kesalahan manusia)

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi
IKK 1.6 = 4 Lokasi

**Jumlah Pelabuhan SDP
yang beroperasi** $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100$$

- **Capaian kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2025 sebesar 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil mencapai target sempurna atau mampu memenuhi target.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi di Triwulan I Tahun 2025 yaitu Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan senilai Rp1.087.720.000,- dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp154.042.262,- atau mencapai 14,16% dengan nomenklatur POK : Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola dengan kode anggaran (4638.CDP.045.051).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan
4. Peningkatan infrastruktur pelabuhan SDP
5. Pengembangan SDM yang berkompeten dibidangnya
6. Penguatan kerjasama dan koordinasi antar stakeholtder terkait
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kapal dan kesiapan peralatan pelabuhan sesuai dengan karakteristik masing – masing pelabuhan
8. Membuat rencana kerja yang belum terlaksana di pelabuhan SDP
9. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pelabuhan SDP.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A
2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) si pelabuhan SDP

IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan jalan.

Jenis Pemeriksaan	Uraian
SPM Terminal	Aspek Keselamatan
	Aspek Keamanan
	Aspek Kenyamanan
	Aspek Kemudahan / Keterjangkauan
	Aspek Kesetaraan
	Aspek Keteraturan

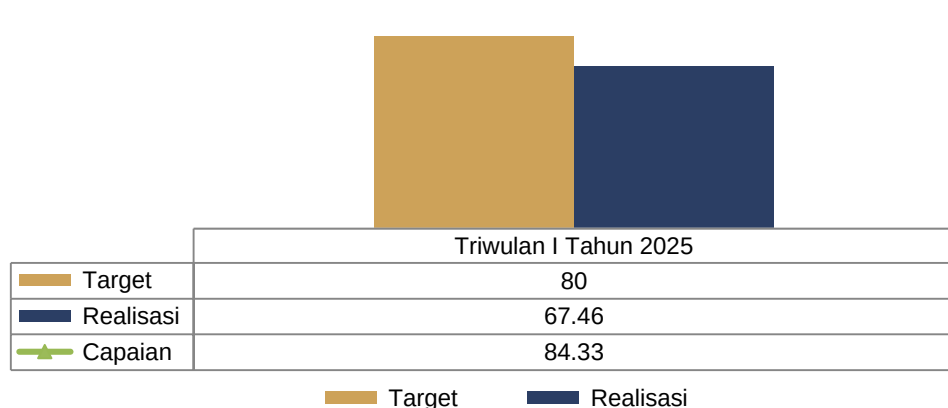
Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Triwulan I tahun 2025 sebesar 67,46 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 80 maka capaian kinerja mencapai 77,24%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.7.** Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.



Gambar III.7. Grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2025.

Tabel II. 22 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target	80
2	Realisasi	67,46
3	Capaian	84,33%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A yang ditetapkan sebesar 80. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada triwulan I sebesar 67,46 sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 84,33%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PM 40 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal tipe-A terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 80 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Komitmen Petugas dalam Pelayanan yang ada di Terminal Tipe-A
2. Fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Terpenuhinya Keamanan, Kebersihan, Ketertiban yang ada di Terminal
4. Pelaksanaan operasional terminal Tipe-A sesuai Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan
5. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Masih ada Fasilitas yang belum terpenuhi
2. Kurangnya SDM yang ada
3. Keadaan Lapangan lainnya seperti kurangnya ruang tunggu untuk penumpang
4. Kurangnya monitoring terhadap fasilitas di terminal dan operasional kendaraan yang beroperasi.

- **Realisasi Kinerja**

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada triwulan I tahun 2025 tercapai 100% dengan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A Gambut Barakat. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

LAPORAN TAHUN 2025
STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL TIPE A GAMBUT BARAKAT
TERMINAL TIPE A GAMBUT BARAKAT

No.	Jenis Pelayanan	Nilai
1	Keselamatan	6
2	Keamanan	15
3	Kehandalan/ Keteraturan	9
4	Kenyamanan	12,5
5	Kemudahan/Keterjangkauan	9,96
6	Kesetaraan	15
Jumlah		67,46

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A pada triwulan I tahun 2025 mencapai 84,33. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai Realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen. Artinya kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A pada triwulan I tahun 2025 belum memenuhi target capaian dengan sempurna.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pelaksanaan Standar} \\ \text{Pelayanan Minimal} \\ \text{(SPM) di Terminal Tipe-A} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,46}{80} \times 100\% = 84,33\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A pada triwulan I Tahun 2025 yaitu Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana senilai Rp422.700.000,- dengan realisasi di triwulan I Tahun 2025 Rp0,- atau mencapai 0% dengan nomenklatur POK : Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana, kode anggaran (4640.FAE.923.D).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas Terminal Tipe-A;
2. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban Terminal Tipe-A;
3. Melaksanakan Pelayanan di Terminal Tipe-A sesuai dengan SPM yang ada;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A.

IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

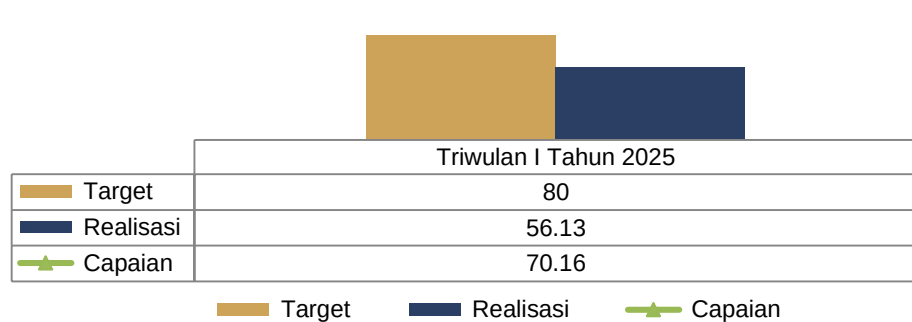
Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Uraian
1. SPM Pelayanan Penumpang 2. SPM Pemuatan Kendaraan 3. SPM Pengoperasian Kapal	Aspek Keselamatan
	Aspek Keamanan
	Aspek Kenyamanan
	Aspek Kemudahan / Keterjangkauan
	Aspek Kesenjangan
	Aspek Keteraturan

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Triwulan I tahun 2025 sebesar 56,13 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 80 maka capaian kinerja mencapai 70,16%. Pencapaian ini

digambarkan pada **Gambar III.9.** Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2025.



Gambar III.9. Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2025

Tabel III. 26 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO		Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target		80
2	Realisasi		56,13
3	Capaian		70,16%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di di pelabuhan SDP Tahun 2025 di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP yang ditetapkan sebesar 80%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada triwulan I sebesar 56,13%. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 70,16%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 39 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 5062/AP005/DRJD/2020 tentang Pedoman Penilaian Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan, pedoman ini menjadi dasar yang mengatur pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP di

bawah Lingkungan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh pengelola pelabuhan penyeberangan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan mencapai standar yang ditetapkan maka ditetapkan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan dibawah Lingkungan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 80% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang triwulan I tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada angkutan penyeberangan di pelabuhan SDP merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

- **Faktor keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan adanya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan koordinasi peraturan dengan Stakeholder Terkait untuk Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM):
 - Mengadakan sosialisasi terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;
 - Mengadakan pertemuan atau forum koordinasi dengan pemerintah daerah, pihak swasta, dan stakeholder terkait lainnya;
 - Membahas strategi untuk memastikan pelabuhan penyeberangan memenuhi standar.
2. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait untuk Memelihara Fasilitas Pelayanan Pelabuhan:
 - Memastikan pemeliharaan dilakukan secara teratur;
 - Menyusun mekanisme pemantauan kondisi fasilitas secara berkala dan tindak lanjut yang diperlukan.
3. Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan SDP Setiap Tahun:

- Menyusun jadwal dan personil untuk kegiatan pemeriksaan SPM di Pelabuhan SDP;
 - Melaksanakan kegiatan pemeriksaan SPM di Pelabuhan SDP dan melaporkan hasil ke pusat.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Penyeberangan Setiap Tahun:
- Menyusun rencana monitoring dan evaluasi terkait hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;
 - Menganalisis hasil monitoring untuk mengidentifikasi area-area perbaikan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada operator pelabuhan SDP.
5. Penerapan Sanksi Sesuai dengan Pedoman yang Berlaku:
- Memastikan penggunaan pedoman yang telah ditetapkan (KP. 5062/AP005/DRJD/2020) untuk menilai kinerja pelabuhan.
 - Memberlakukan sanksi kepada pengelola pelabuhan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman (KP. 5062/AP005/DRJD/2020).

Melalui kegiatan-kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja sama yang efektif antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, pemerintah daerah, pihak swasta, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP sesuai dengan pedoman yang berlaku.

• **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP antara lain:

1. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP mengalami kendala bilamana cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan musim penghujan, sehingga dapat menghambat kegiatan tersebut.
2. Kurangnya pemahaman pengguna jasa tentang keselamatan dan ketertiban selama melakukan perjalanan dalam menggunakan angkutan penyeberangan.
3. Masih adanya kendaraan ODOL (*Over Dimensi Over Load*) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain;
4. Belum adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan dan penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan SDP sehingga hasil atau nilai yang diperoleh kurang maksimal;
5. Masih banyaknya fasilitas pelabuhan SDP yang belum tersedia atau rusak sehingga tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan

SDP;

6. Terbatasnya biaya operasional, perawatan, pemeliharaan Pelabuhan SDP yang disediakan oleh pengelola pelabuhan SDP sehingga sulit memenuhi SPM sesuai dengan peraturan;
7. Pengelola pelabuhan SDP belum memahami terkait Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 5062/AP005/DRJD/2020 tentang Pedoman Penilaian Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan;
8. Kerjasama dan koordinasi yang lemah antar stakeholder;
9. Kurangnya pengawasan dan evaluasi;
10. Pelayanan yang buruk.

- **Realisasi kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP pada triwulan I tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 56,13%. Pada hal ini telah dilakukan rekapitulasi hasil SPM di Pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan pelabuhan penyeberangan :

NO	Pelabuhan	Nilai	Klasifikasi
1.	Pelabuhan Penyeberangan Batulicin	63,10	C (cukup)
2.	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang	60,04	C (cukup)
3.	Pelabuhan Penyeberangan Stagen	39,97	D (kurang baik)
4.	Pelabuhan Penyeberangan Tarjun	38,91	D (kurang baik)
5.	Pelabuhan Penyeberangan Pulau Laut Timur	46,09	D (kurang baik)
6.	Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebuku	39,50	D (kurang baik)
7.	Pelabuhan Danau Aranio	10,72	D (kurang baik)
8.	Pelabuhan Sungai Banjaraya	61,00	C (cukup)

Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 \text{Persentase pelaksanaan} & \\
 \text{Standar Pelayanan Minimum (SPM) di} & \\
 \text{pelabuhan SDP} &= \frac{44,91}{80} \times 100\% = \mathbf{56,13\%}
 \end{aligned}$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP pada triwulan I tahun 2025 adalah 70,16%. Dimana Hasil persentase berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen. Artinya capaian kinerja

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP pada triwulan I tahun 2025 belum memenuhi target yang sempurna.

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP pada triwulan I Tahun 2025 yaitu yaitu Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana senilai Rp422.700.000,- dengan realisasi di triwulan I Tahun 2025 Rp0,- atau mencapai 0% dengan nomenklatur POK : Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana, kode anggaran (4640.FAE.923.D).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Pelabuhan sesuai Standar:
2. Memastikan semua fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan pelabuhan, seperti dermaga, terminal, tempat tunggu, dan fasilitas lainnya, memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut SPM kepada pengelola pelabuhan dengan melakukan perbaikan atau perawatan;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi fasilitas dan melakukan perbaikan atau peningkatan sesuai kebutuhan.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM:
5. Melakukan monitoring yang efektif untuk mengawasi implementasi Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP;
6. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi area-area perbaikan dan menyusun rencana tindak lanjut yang diperlukan.
7. Pelatihan dan Pengembangan SDM:
8. Mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi petugas pemeriksaan SPM Pelabuhan SDP terkait agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menilai dan melaksanakan Standar Pelayanan Pelabuhan dengan tepat.
9. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait:
10. Membangun kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, pihak swasta, dan organisasi setempat untuk mendukung implementasi SPM.
11. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP;
12. Peningkatan infrastruktur pelabuhan SDP;
13. Peningkatan kualitas layanan SDP
14. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pelayanan di pelabuhan SDP, serta mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan perhatian yang terus-menerus terhadap perawatan fasilitas, monitoring pelaksanaan, dan pengembangan sumber daya manusia, pelabuhan penyeberangan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi harapan pengguna.

Sasaran Strategis 3: SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi darat

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal.

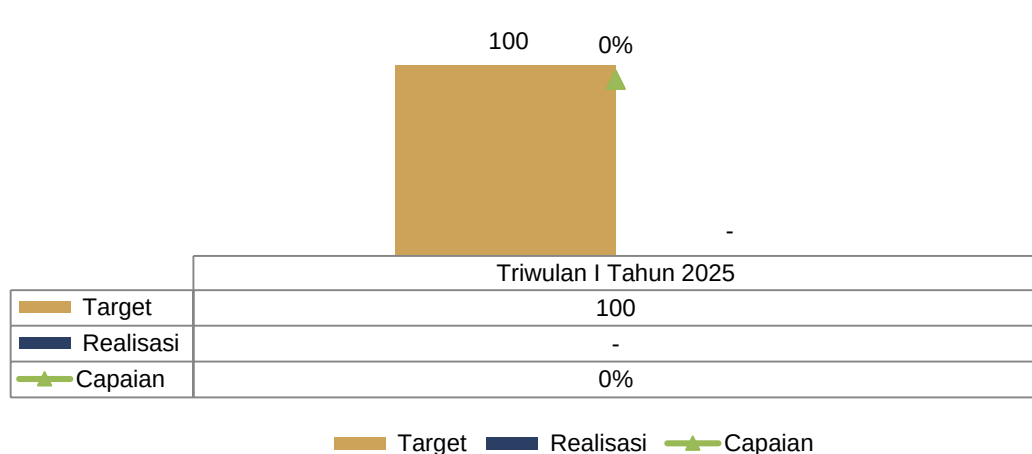
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi :

- 1) Alat Penerangan Jalan;
- 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;
- 3) Marka Jalan;
- 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 5) Paku Jalan;
- 6) Rambu Lalu Lintas;
- 7) Rambu Tiang Gawang;
- 8) Rambu Tiang F;
- 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;
- 10) Pagar Pengaman Jalan;

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai PengelolaTransportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Triwulan I tahun 2025 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 0%.Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10**. Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal.



Gambar III.10. Grafik Capaian IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal

Tabel II. 30 Target dan Realisasi Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan I Tahun 2025 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target	100
2	Realisasi	0
3	Capaian	0%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan I sebesar 0%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 0%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan, maka ditetapkan untuk pelaksanaan Perlengkapan Jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan telah sesuai berdasarkan dasar hukum.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang triwulan I tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasangkondisi ideal antara lain:

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
3. Kesesuaian dengan kebutuhan;
4. Barang dikirim tepat waktu;
5. Komunkasi yang efektif;
6. Perencanaan yang matang;
7. Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan;
8. Kualitas dan Kuantitas sesuai.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk);
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan;
4. Pengiriman barang yang terlambat;
5. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi;
6. Tidak ada nya perencanaan;
7. Pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan;

8. Kualitas dan Kuantitas tidak sesuai;
9. Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan tertunda.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal pada triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{0}{100} \times 100\% = 0\%$$

- **Capaian kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal di triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{100} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2025 yaitu senilai Rp12.017.000.000,- dengan realisasi di triwulan I Tahun 2025 Rp0,- atau mencapai 0% dengan Nomenklatur POK : Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Kode Anggaran (4639.RAC.053.051).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan;
4. Melaksanakan Pemasangan perlengkapan jalan di kondisi ideal yang telah ditentukan;
5. Menghidupkan lingkungan yang nyaman sehingga terlaksananya komunikasi yg efektif untuk pencapaian yang sesuai dengan harapan;
6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

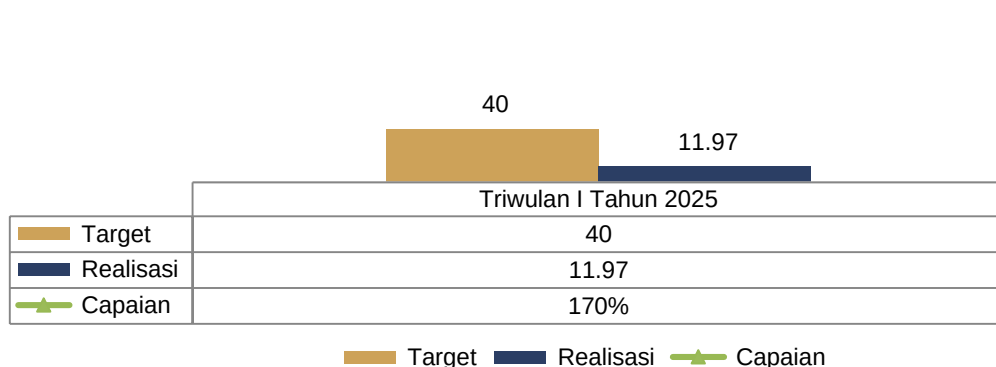
BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Fasilitas Penimbangan yang dilaksanakan oleh Satpel UPPKB untuk pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

- Tata cara pemuatan barang;
- Dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- Dokumen Angkutan Barang;
- Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
- Jenis barang yang diangkut, berat angkutandan asal tujuan.

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran dengan jumlah kendaraan yang masuk dalam UPPKB itu sendiri. Adapun jenis pelanggaran yang disebut berupa pada kelengkapan administrasi, pemuatan, berat kendaraan beserta muatan dan dimensi kendaraan. Semakin besar persentase pelanggaran yang ditemukan, maka dinilai buruk. Sebaliknya jika kecil persentase pelanggaran, maka dinilai baik.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat triwulan I tahun 2025 sebesar 11,97% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 40% maka capaian kinerja mencapai 170%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10**. Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Gambar III.10. Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Tabel II. 34 Target dan Realisasi Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2025 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target	40
2	Realisasi	11,97
3	Capaian	170%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan sebesar 40%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan I sebesar 11,97%. Sehingga capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 170%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan PM 85 Tahun-2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki target 45 yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang triwulan I tahun 2025 belum terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja 2025.

• Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Para sopir dan armada angkutan bersedia dengan sadar diri memasuki wilayah UPPKB;
2. Para sopir dan armada angkutan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
3. Para sopir dan armada angkutan tertib administrasi maupun muatan barang.
4. Persaingan Harga yang tidak sehat antara penyedia jasa angkutan barang sehingga untuk menutupi kerugian dari penyedia jasa angkutan barang akan memuat lebih banyak barang dan mengakibatkan kendaraan Overload, sehingga perlu adanya aturan Tarif minimal angkutan barang.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Para sopir dan armada angkutan susah untuk diarahkan memasuki wilayah UPPKB;
2. Kurangnya kesadaran Para sopir dan armada angkutan untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku ;
3. Para sopir dan armada angkutan tidak tertib dalam administrasi maupun kelebihan muatan barang.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

$$\% Realisasi = \frac{(40 - (11,97 - 40))}{40} \times 100\% = 170\%$$

- **Capaian kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% Capaian = \frac{(40 - (11,97 - 40))}{40} \times 100\% = 170\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada triwulan I Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp1.433.541.000,- dengan realisasi di triwulan I Tahun 2025 Rp152.884.133,- atau mencapai 10,66% dengan Nomenklatur POK : Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola Kode Anggaran (4639.CDP.077.052.B).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan.

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

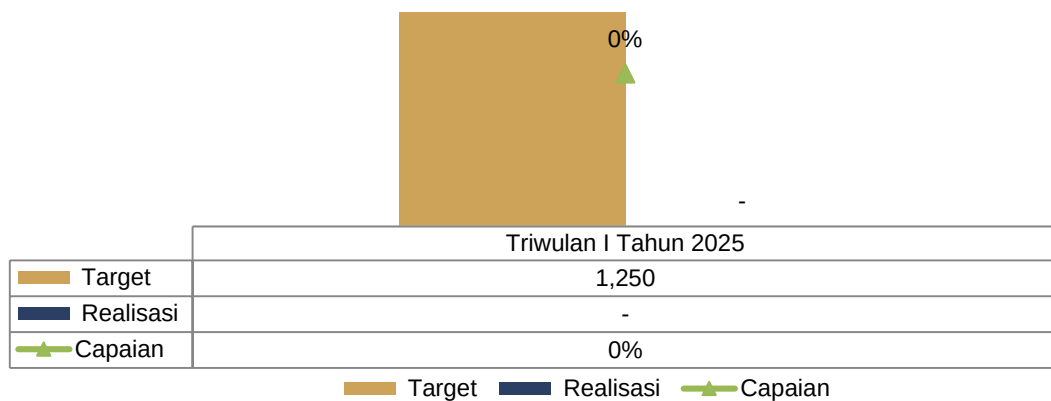
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Sasaran peserta dari kegiatan Pekan Keselamatan Jalan yaitu mulai dari anak-anak TK hingga SMA.

Untuk menghitung Indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang} \\ &\text{Keselamatan Transportasi Jalan} \end{aligned} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan I tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1250 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.14**. Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



Gambar III.14. Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

Tabel II. 42 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I Tahun 2024
1	Target	15
2	Realisasi	0
3	Capaian	0%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan yang ditetapkan sebesar 1.250 orang. Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada triwulan I sebesar 0 orang. Sehingga capaian Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 0%.

a.3. Analisa Keberhasila dan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b “Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 1250 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Sosialisai tentang acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan pada media sosial dan spanduk;
2. Tersedianya anggaran yang memadai;
3. Kerjasama Tim panitia pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Tidak tersampainya informasi keselamatan bagi masyarakat yang tidak memperhatikan sosialisasi;
2. Tidak tersampainya undangan untuk menghadiri acara;
3. Panitia penyelenggara kurang berpengalaman.

- **Realisasi kinerja**

Persentase capaian Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun anggaran 2025 belum terealisasi karena pada hal nya sosialisasi pekan keselamatan jalan akan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama dibulan september.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1250} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp357.143.000,- dengan realisasi di triwulan I Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan yang berkeselamatan
2. Menciptakan rasa nyaman bagi penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum
3. Mewujudkan bentuk tanggungjawab dan kepedulian insan perhubungan

IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan alat uji disetiap PKB laik fungsi berjalan sesuai SOP pada seluruh Kab/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kab/Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB adalah sebagai aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

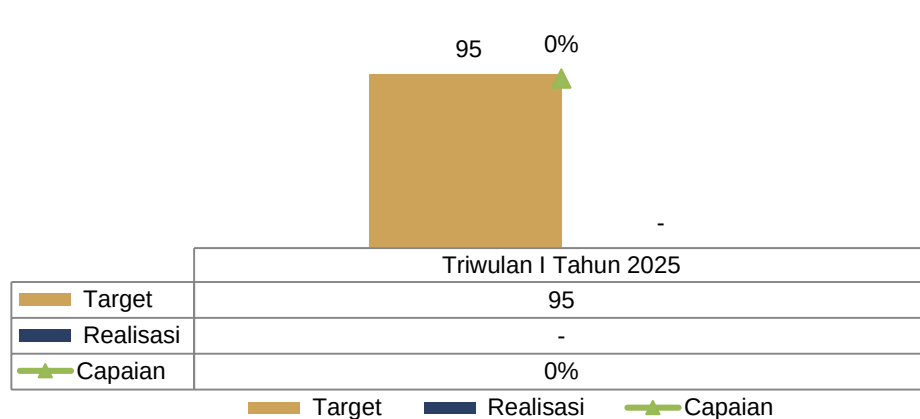
Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

**Persentase standarisasi pengujian
berkala kendaraan bermotor**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Triwulan I tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 95% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.16**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2025.



Gambar III.16. Grafik Capaian IKK 7a Capaian kinerja Persentase standarisai Pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2025

Tabel II. 46 Target dan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan I Tahun 2025 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target	95
2	Realisasi	0
3	Capaian	0%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebesar 95%. Realisasi Jumlah Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan I sebesar 0%. Sehingga capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 0%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1471/aj.402/drjd/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 95 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota yang ada di Kalsel
2. Ketersediaan Alat uji yang lengkap dan telah terkalibrasi
3. Fasilitas pengujian yang terstandarisasi melalui akreditasi

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Tidak memiliki gedung uji
2. Tidak lengkapnya alat yang akan diuji
3. ketidak mampuan Dishub Kab/Kota untuk memenuhi Fasilitas dan Alat uji kendaraan bermotor

- **Realisasi Kinerja**

Ruang Lingkup Unit Pelaksana Uji Berkala (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kab/Kota di wilayah kerja BPTD Kelas II Kalimantan Selatan yang terdiri 13 (tigabelas) Kab/Kota dengan penetapan standarisasi berupa Akreditasi UPUBKB, yaitu sebagai berikut :

NO	DAERAH UPUBKB	AKREDITASI				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Banjarmasin	B	A	A	A	
2	Kota Banjarbaru	B	B	B	B	
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	B	B	B	B	
4	Kabupaten Hulu Sungai Utara	B	B	B	B	
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	B	B	B	B	
6	Kabupaten Tapin	-	-	-	-	
7	Kabupaten Barito Kuala	B Bersyarat	B	B	B	
8	Kabupaten Tanah Laut	B	B	B	B	
9	Kabupaten Tanah Bumbu	B	B	B	B	
10	Kabupaten Tabalong	B	A	A	A	
11	Kabupaten Kotabaru	-	B	B	B	
12	Kabupaten Banjar	B	B	B	B	
13	Kabupaten Balangan	B	B	B	B	

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

**Persentase standarisasi pengujian
berkala kendaraan bermotor**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{0}{95} \times 100\% = 0\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada triwulan I tahun 2025 merupakan kegiatan kalibrasi alat uji pada pengujian kendaraan bermotor di 13 Kab/Kota provinsi Kalimantan Selatan yang mana pada Triwulan I ini telah ada permohonan masuk kalibrasi alat uji pada dishub kab/kota sekalsel namun permohonan tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena terdampak efisiensi anggaran.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{95} = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor senilai Rp340.050.000,- dengan realisasi di triwulan I Tahun 2025 Rp0,- atau mencapai 0% dengan Nomenklatur POK : Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan, Kode Anggaran (4640.FAE.923.B).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terciptanya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alatukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Menjamin peralatan alat ukur/uji yang digunakan harus sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan;
3. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai standar dan SOP yang telahditentukan;
4. Terus meningkatkan kualitas SDM terkait pengujian kendaraan bermotor melalui Bimtek dan pelatihan – pelatihan;
5. Membantu Dishub Kab/ Kota untuk memenuhi Peralatan uji kendaraan bermotor.

IKK7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

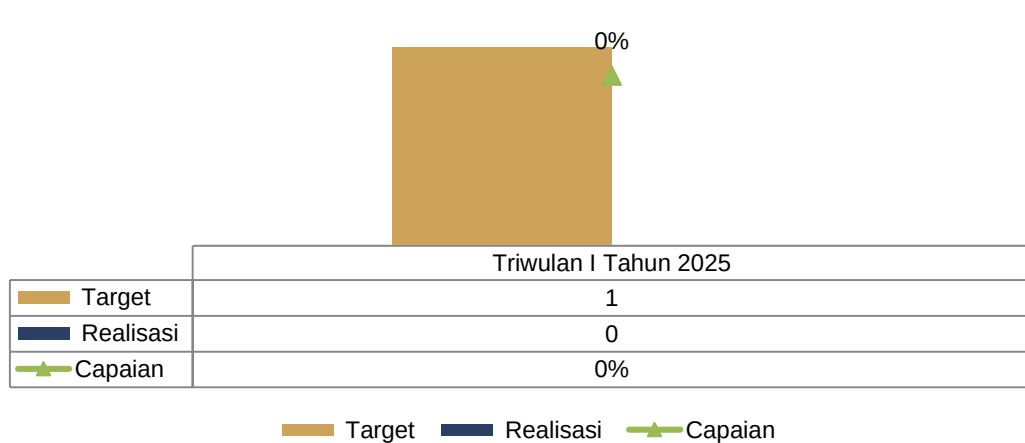
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai PengelolaTransportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Triwulan I tahun 2025 sebesar 0 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 lokasi maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada

Gambar III.17. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada triwulan I Tahun 2025.



Gambar II.1. Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada triwulan I Tahun 2025

Tabel III. 50 Target dan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan I Tahun 2025 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO		Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target		1
2	Realisasi		0
3	Capaian		0%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP yang ditetapkan sebesar 1 Lokasi. Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada triwulan I sebesar 0 Lokasi. Sehingga capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 0%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, maka telah ditetapkan sebagai dasar pemasangan rambu sungai.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 1 lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain:

1. Kondisi lapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan
4. Lokasi pekerjaan tidak terlalu jauh
5. Tidak adanya gangguan dari pihak eksternal
6. Pemenuhan pekerjaan sesuai dengan target rencana

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk)
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan
4. Akses jalur sungai banyak terdapat jembatan kecil
5. Surutnya air sungai sehingga tidak bisa melaksanakan pemasangan rambu

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada triwulan I tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP}}{\text{Target}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dilaksanakan atau mencapai 0% dikarenakan adanya dampak

efisiensi sehingga kegiatan terblokir. Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada triwulan I tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada triwulan I Tahun 2025 yaitu senilai Rp750.000.000,- dengan realisasi di triwulan I Tahun 2025 Rp0,- atau mencapai 0% dengan Nomenklatur POK : Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau, Kode Anggaran (4639.CAC.065.051.A).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2023, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan;
4. Menginventarisasi kembali jumlah rambu sungai yang akan dipasang;
5. Memasang rambu sungai di daerah yang belum terpasang.

Sasaran Strategis 4: SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Program 4 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Salah satu bobot yang mempengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran Tahun 2025 BPTD Kelas II Kalimantan Selatan.

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Berikut adalah tabel perhitungan nilai bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25	
	I	SAKIP	15	
	a	Rencana Strategis (Renstra)	3	
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai <30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		

	c	Perjanjian Kinerja (PK)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	e	Input Aplikasi e-Performance	1	
		Nilai 1 (satu) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
		Nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3	
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 30 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 30-60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	10	
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan		
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif		
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif		
B	Indeks Profesionalisme ASN		25	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6	
	2	Kompetensi	10	
	3	Kinerja	8	
	4	Disiplin	1	
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan		25	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap $\geq 100\%$		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5	

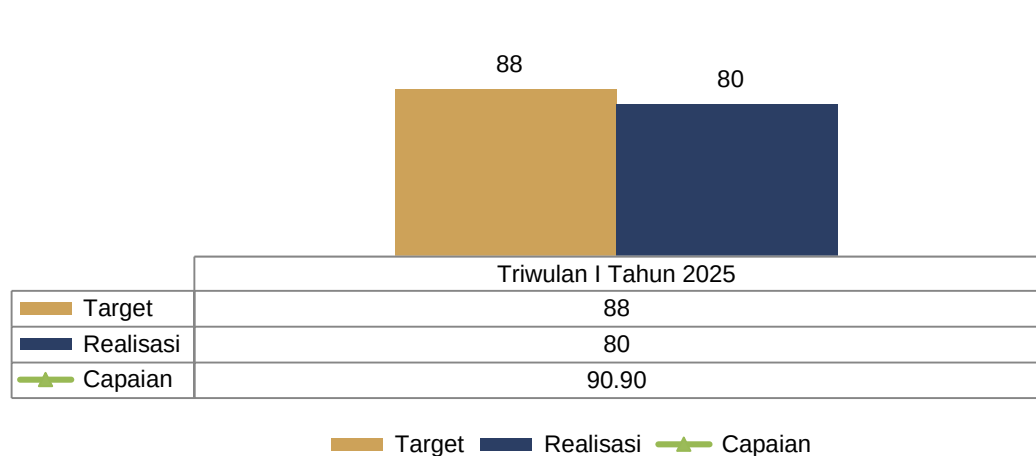
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
D	Tingkat Pengelolaan Hukum dan Humas		25%	
	1	Penyusunan NSPK	7	
		Nilai 7 (tujuh) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 5 (lima) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 3 (tiga) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 1 (satu) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas kurang dari 40%		
	2	Pengelolaan Informasi Publik	6	
		Nilai 6 (enam) apabilasebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabilasebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabilakurang dari 70%		
	3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6	
		Nilai 6 (enam) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan kurang dari 70%		
	4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6	
		Nilai 6 (enam) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan kurang dari 70%		

Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasidarat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai PengelolaTransportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I tahun 2025 senilai 80 . Jika dibandingkan dengan target PK 2025 senilai 88 maka capaian kinerja mencapai 90,90% Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 18.** Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat



Gambar III 18. Grafik Capaian IKK 5.1 Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025

Tabel II. 54 Target dan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target	88
2	Realisasi	80
3	Capaian	90,90%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yang ditetapkan senilai 88. Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada triwulan I senilai 80. Sehingga capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Jalan sebesar 90,90%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis transportasi darat memiliki

target senilai 88 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Dokumen perencanaan telah diselesaikan secara tepat waktu;
2. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan
3. Adanya penambahan ASN yang kompeten

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknistransportasi darat antara lain:

1. Pelaksanaan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu;
2. Daya serap anggaran satuan kerja yang tidak sesuai target;
3. Kurangnya SDM yang berkualitas dan kompeten dibidangnya;
4. Efisiensi Anggaran.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar :

Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} &= \frac{22+25+15+18}{100} \times 100\% \\ &= \frac{80}{100} \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25	25
	I	SAKIP	15	12
	a	Rencana Strategis (Renstra)	3	0
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai <30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		

		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
	c	Perjanjian Kinerja (PK)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	e	Input Aplikasi e-Performance	1	1
		Nilai 1 (satu) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
		Nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3	3
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 30 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 30-60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	10	10
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan		
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif		
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif		
B		Indeks Profesionalisme ASN	25	25
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6	6
	2	Kompetensi	10	10
	3	Kinerja	8	8
	4	Disiplin	1	1
C		Tingkat Pengelolaan Keuangan	25	15
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	5
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap $\geq 100\%$		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		

	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5	0
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
D	Tingkat Pengelolaan Hukum dan Humas		25	18
	1	Penyusunan NSPK	7	0
		Nilai 7 (tujuh) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 5 (lima) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 3 (tiga) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 1 (satu) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas kurang dari 40%		
	2	Pengelolaan Informasi Publik	6	6
		Nilai 6 (enam) apabilasebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabilasebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabilakurang dari 70%		
	3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6	6
		Nilai 6 (enam) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan kurang dari 70%		
	4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6	6
		Nilai 6 (enam) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan kurang dari 70%		

• Capaian Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukunganteknis transportasi darat di Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80}{88} \times 100\% = 90,90\%$$

• Realisasi Anggaran

Adapun anggaran kegiatan terkait Capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraandukungan teknis transportasi darat di Tahun 2025 yaitu senilai Rp3.793.540,- dan sampai dengan Triwulan I 2025 realisasi anggaran senilai Rp 166.742.250,- atau sebesar 4,40%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya untuk meningkatkan capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknistransportasi darat dimasa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan naskah yang masuk dan keluar serta mengkoreksi naskahdinas agar sesuai aturan;
3. Meningkatkan pengelolaan arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan;
4. Dapat menyelesaikan capaian laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkanhasil kegiatan yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Program 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan BPTD Kelas II Kalsel dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan BPTD Kelas II Kalsel.

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

1. Cara Menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat melalui perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.

2. Bobot:

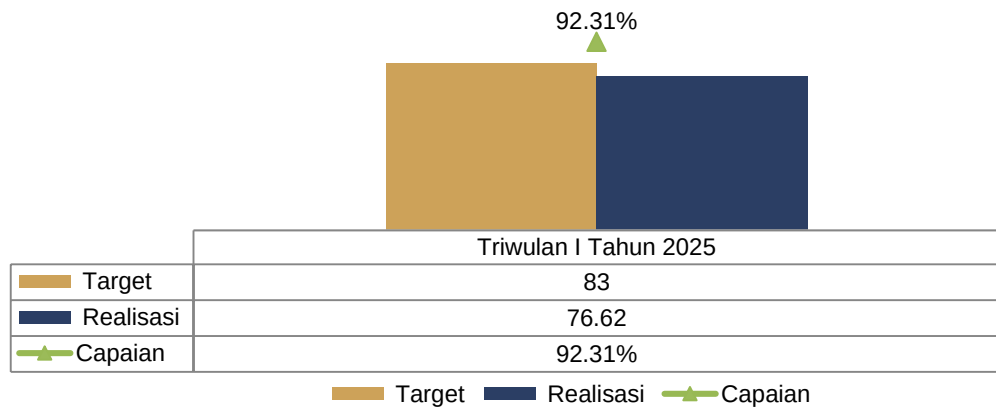
- Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
- Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
- Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I tahun 2025 sebesar 76,62 Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 83 maka capaian kinerja mencapai 92,31%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.19**. Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.



Gambar III.19. Grafik Capaian IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.

Tabel II. 58 Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO		Rincian	TW-I Tahun 2025
1	Target		83
2	Realisasi		76,62
3	Capaian		92,31%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan senilai 83. Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan I senilai 76,62. Sehingga capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 92,31%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2025.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel memiliki

target 83 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Melakukan survey tingkat kepuasan baik kepada pejabat, maupun staf terkait layanan perkantoran;
2. Meningkatkan ketersediaan pc/laptop dengan menyesuaikan jumlah pegawai;
3. Meningkatkan kecepatan internet (unduh) di kantor.
4. Meningkatkan kesadaran antar pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Ketersediaan PC/laptop masih belum sesuai dengan jumlah pegawai;
2. Kecepatan fasilitas unduh internet masih dibawah standar kecepatan internet;
3. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan oleh unit kerja.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat di Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	23,25%
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	13,8
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	9,45
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	12,87%
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	40,5%
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	20
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	5,5
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	15
TOTAL			100%	76,62%

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2023 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia.(SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat di Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen} \\ \text{Perhubungan Darat} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{23,25\% + 12,87\% + 40,5\%}{83} \times 100\% \\ &= \frac{76,62}{83} \times 100\% = \mathbf{92,31\%} \end{aligned}$$

Note : Untuk Cara perhitungan melalui Hasil survey Kuisisioner terlampir pada halaman lampiran pendukung

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp6.647.028.000,- dengan realisasi di triwulan I Tahun 2025 Rp2.229.660.131,- atau mencapai 33,54%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan layanan perkantoran;
2. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan dana yang ada.
3. Meningkatkan pengawasan pada kegiatan layanan perkantoran.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.3 REALISASI ANGGARAN

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.1.1 Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar **Rp 69,067,331,000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2. Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

RM	Rp.	67.852.281.000	98,24%
PNBP	Rp.	1.215.050.000	17,59%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	69,067,331,000	100,00%

Tabel II.3. Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	11.020.022.000	15,95%
Belanja Barang	Rp.	40.483.653.000	58,61%
Belanja Modal	Rp.	17.563.656.000	25,42%
Total	Rp.	69,067,331,000	100,00%

Tidak Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar **Rp 69.067.331.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Triwulan I TA. 2025 adalah sebesar **Rp 69.067.331.000,-** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III. 64. Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan I TA. 2025

RM	Rp.	67.852.281.000	98,24%
PNBP	Rp.	1.215.050.000	17,59%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	69,067,331,000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalsel

Tabel III. 65 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan I TA. 2025

Belanja Pegawai	Rp.	11.020.022.000	15,95%
Belanja Barang	Rp.	40.483.653.000	58,61%
Belanja Modal	Rp.	17.563.656.000	25,42%
Total	Rp.	69,067,331,000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalsel

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Kementerian Keuangan tanggal 2 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2025 (DIPA awal);
- b. Surat Kementerian Keuangan tanggal 22 Februari 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2025 (Revisi 1);
- c. Surat Kementerian Keuangan tanggal 24 Maret 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2025 (Revisi 2);

II.3.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 2 (dua) kali revisi DIPA , maka berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel II.4. Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	67.852.281.000	1.215.050.000	-	69,067,331,000
REVISI KE-1	67.852.281.000	1.215.050.000	-	69,067,331,000
REVISI KE-2	67.852.281.000	1.215.050.000	-	69,067,331,000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

Tabel II.5. Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2025

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	11.020.022.000	40.483.653.000	17.563.656.000	69,067,331,000
REVISI KE-1	11.020.022.000	40.483.653.000	17.563.656.000	69,067,331,000
REVISI KE-2	11.020.022.000	40.483.653.000	17.563.656.000	69,067,331,000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

Tabel II.6. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2025

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
Belanja Pegawai	11.020.022.000	-	11.020.022.000
Belanja Barang	40.483.653.000	-	40.483.653.000
· RM	40.018.603.000	-	40.018.603.000
· PNB	465.050.000	-	465.050.000
Belanja Modal	17.563.656.000	-	17.563.656.000
· RM	16.813.656.000	-	16.813.656.000
· PNB	750.000.000	-	750.000.000
· SBSN	-	-	-
TOTAL	69,067,331,000	-	69,067,331,000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.7. Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03	BPTD Kelas II Kalsel	69.067.331.000	69.067.331.000	6.758.085.139	9,78
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	51.400.281.000	51.400.281.000	1.330.632.463	2,59
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	12.150.246.000	12.150.246.000	452.126.760	3,72
4638	Pelayanan Transportasi Darat	4.117.593.000	4.117.593.000	517.057.691	12,56
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	21.635.882.000	21.635.882.000	194.705.762	0,9
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	13.496.560.000	13.496.560.000	166.742.250	1,24
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	17.667.050.000	17.667.050.000	3.523.452.676	19,94
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.647.028.000	6.647.028.000	211.360.131	31,82
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	11.020.022.000	11.020.022.000	3.312.092.545	30,06

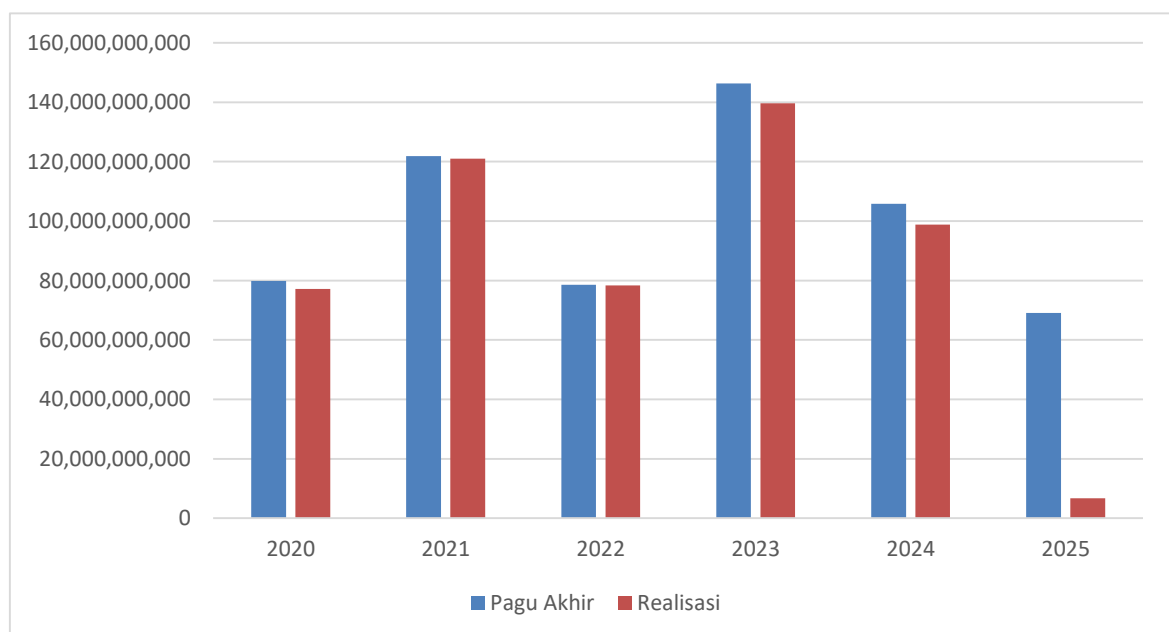
Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2025 Triwulan I

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	55,554,837,000	79,811,927,000	77,211,002,220	96,74
2	2021	148,262,010,000	121,837,135,000	121.064.932.049	99,37
3	2022	100.083.085.000	78.614.942.000	78.332.449.923	99,64
4	2023	138.192.830.000	146.320.980.000	139.627.744.060	95,43
5	2024	104.829.325.000	105.830.240.000	98,819,944,802	93,38
6	2025	69.067.331.000	69.067.331.000	6.758.085.139	9,78



Gambar III.2. Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun **2020** anggaran yang terserap sebesar Rp. 77.211.002.220,- atau mencapai 96,74% dari pagu akhir Rp. 79.811.927.000,-. Pada tahun **2021** daya serap sebesar Rp. 121.064.932.049,- atau mencapai 99,37% dari pagu akhir Rp. 121,837,135,000,-. Pada tahun **2022** daya serap sebesar Rp. 78.332.449.923,- atau mencapai 99,64% dari pagu akhir Rp. 78.614.942.000,-. Pada tahun **2023** serapan anggaran sebesar Rp. 139.627.744.060,- atau mencapai 95,43% dari pagu akhir Rp. 146.320.980.000,-. Dan pada tahun **2024** serapan anggaran sebesar Rp. 98.819.944.802,- atau mencapai 93,38% dari pagu akhir Rp. 105.830.240.000,-. Serta pada tahun **2025** serapan anggaran pada Triwulan I sebesar Rp. 6.758.085.139,- atau mencapai 9,78% dari pagu akhir Rp. 69.067.331.000,-

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.9. Kegiatan Program yang ada dalam DIPA 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03	BPTD Kelas II Kalsel	69.067.331.000	69.067.331.000	6.758.085.139	9,78
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	51.400.281.000	51.400.281.000	1.330.632.463	2,59
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	12.150.246.000	12.150.246.000	452.126.760	3,72
4638	Pelayanan Transportasi Darat	4.117.593.000	4.117.593.000	517.057.691	12,56
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	21.635.882.000	21.635.882.000	194.705.762	0,9
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	13.496.560.000	13.496.560.000	166.742.250	1,24
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	17.667.050.000	17.667.050.000	3.523.452.676	19,94
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.647.028.000	6.647.028.000	211.360.131	31,82
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	11.020.022.000	11.020.022.000	3.312.092.545	30,06

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 6.758.085.139,-** atau mencapai 9,78% dari pagu akhir **Rp 69.067.331.000,-**

II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.10. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja triwulan I Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	11.020.022.000	3.312.092.545	30,06
2	Belanja Barang	40.483.653.000	3.445.992.594	8,51
3	Belanja Modal	17.563.656.000	0	0
TOTAL		69,067,331,000	6,758,085,139	9,78

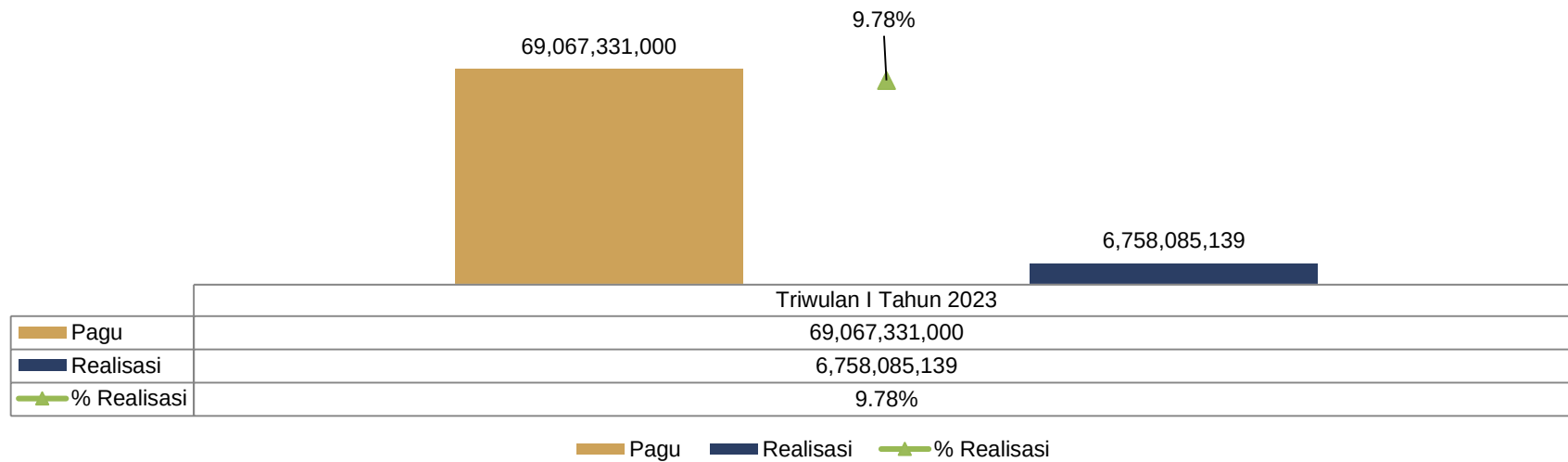
Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2025 Triwulan I realisasinya sebesar 9,78% .

II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.11. Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I 2025

NO	SUMBER DANA	ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	67,852,281,000	6,758,085,139	9,96
2	PNBP	1,215,050,000	0	0
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		69,067,331,000	6,758,085,139	9,78



Gambar III.3. Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2025 dari Triwulan I realisasi sebesar 9,78%.

II.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.12 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	11.020.022.000	3.312.092.545	7.707.929.455
2	Belanja Barang	40.483.653.000	3.445.992.594	37.037.660.406
3	Belanja Modal	17.563.656.000	0	17.563.656.000
TOTAL		69,067,331,000	6,758,085,139	62,309,245,861

Tabel II.13 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	67.852.281.000	6,758,085,139	61,094,195,861
2	PNBP	1.215.050.000	0	1.215.050.000
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		69,067,331,000	6,758,085,139	62,309,245,861

Tabel II.14 Rincian sisa Anggaran Tahun 2025

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana		-
2	Kegiatan yang Terblokir		
3	Sisa Kontraktual	13,424,622,000	651,931,596
	a. Belanja Barang	10,509,272,000	651,931,596
	b. Belanja Modal	2,915,350,000	0
4	Sisa Non Kontraktual	8,552,050,000	2,794,060,998
	a. Belanja Barang	8,552,050,000	2,794,060,998
	b. Belanja Modal	-	-
5	Sisa Belanja Pegawai	11,020,022,000	3,312,092,545

II.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.15. Efisiensi anggaran

No	Sasaran Progam	Triwulan I		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (triwulan I)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoda Transportasi	58,57	19,47	
2	SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	73,7	0	
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	34	2,13	
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi darat	90,90	4,40	
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel			
Rata-Rata				

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran Triwulan III sebesar 82,76% dengan realisasi anggaran (capaian keuangan) sebesar 72,08% menunjukan adanya efisiensi anggaran sebesar 10,68%

II.5 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel II.16. Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	267	187	70,03%	144	144	100%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa capaian SDM sebesar 70,03% dengan realisasi sebanyak 187 SDM dari jumlah kebutuhan sebesar 267, dimana realisasi tersebut terdiri dari 83 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 104 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rata-rata Target Kinerja sebesar 144 dan Realisasi Kinerja sebesar 144% menunjukkan Capaian Kinerja sebesar 100%.

II.6 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran.
3. Dalam Kegiatan kontrak, faktor cuaca/ faktor alam tidak menentu yg menjadikan kendala dalam pelaksanaannya.

BAB III PENUTUP

III. Penutup

III.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dari 13 (tigabelas) Indikator Kinerja Program (IKP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Triwulan I tahun 2025, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 9,3% (target 100%) tercapai 9,3% ;
2. Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 1 lokasi (target 1 lokasi) tercapai 100% ;
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 25% (target 100%) tercapai 25%;
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 100%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 67,46% (target 80%) tercapai 84,33%;
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 56,13% (target 80%) tercapai 70,16%;

7. Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 0% (target 100%) tercapai 0%;
8. Jumlah Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 11,97% (target 40%) tercapai 170%;
9. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 orang (target 1200 orang) tercapai 0%;
10. Persentase Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 0% (target 95%) tercapai 0%;
11. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 0 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 0%;
12. Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 80 (target senilai 88) tercapai 90,90%;
13. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 76,62 (target senilai 83) tercapai 92,31%;

Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan ;

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.1. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	100	9,3	9,3%	BELUM TERCAPAI	1. Sudah dilakukan lelang kontrak kegiatan antara BPTD dengan Perum DAMRI Cab. Banjarmasin pada tgl 24 Februari 2025 dengan Nomor: PL.107/2/11/BPTD-KALSEL/2025 2. Akan dilakukan monitoring ritase disetiap bulannya	-Seksi Lalin -Seksi Sarana
			IKK 1.3	Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanankeperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	25	25%	BELUM TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3.Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yangberoperasi	lokasi	4	4	4	100%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan; Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A	%	80	80	67,46	84,33%	BELUM TERCAPAI	Pemenuhan SPM di Terminal Tipe-A telah dilaksanakan pada TW.1	Seksi Prasarana
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80	80	56,13	70,16%	BELUM TERCAPAI	Pemenuhan SPM Pelabuhan telah dilaksanakan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kegiatan pengadaan perlengkapan jalan belum dapat dilaksanakan dikarenakan untuk kegiatan sementara terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	Seksi Lalin
			IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40	40	11,97	170%	BELUM TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Lalin
			IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1200	1200	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan dibulan September, namun untuk kegiatan sementara terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	Seksi Sarana
			IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	95	0	0%	BELUM TERCAPAI	1. Pada Bulan Jan-Mar telah ada permohonan masuk kalibrasi alat uji pada dishub kab/kota sekalsel namun, permohonan tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena terdampak efisiensi anggaran 2. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota	Seksi Sarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	1	0%	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pengadaan dan pemasangan rambu sungai belum dapat dilaksanakan dikarenakan terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	Seksi Lalin
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan dukunganteknis transportasi darat	nilai	88	88	80	90,90%	BELUM TERCAPAI	1. Telah terlaksana kegiatan Pengelolaan bidang ketatausahaan untuk kegiatan rutin: 2. Melakukan Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran 3. Melakukan Penyusunan saki, spip, lkip, profil bptd 4. Melakukan Monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen PerhubunganDarat	nilai	83	83	76,62	92,31%	BELUM TERCAPAI	Terlaksananya manajemen terhadap SDM pegawai BPTD Kalsel	Subbag Tata Usaha



Lampiran



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	80
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.250
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83

Banjar, 1 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan


SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Ahmad Yani KM. 17
(Komp. Terminal Gambut Barakat)
Kab. Banjar, 70652

TELP : (0511) 6746526

FAX : (0511) 6776614
Email : bptdkalsel@gmail.com

Nomor : PR.202/1/1/BPTD-KALSEL/2025

Banjar, 6 Januari 2025

Klasifikasi : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Pengesahan Dokumen PK BPTD Kelas II Kalsel

Yth. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bersama ini mengusulkan permohonan pengesahan PK Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025, sebagaimana *terlampir*.

Demikian disampaikan atas perhatian dan pertimbangan lebih lanjut Bapak Plt. Dirjen Hubdat, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan

Sigit Mintarso
NIP. 19680130 199003 1 001

Tembusan Yth :

Kabag Perencanaan Setditjen Hubdat



PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	lin Maelani, S. Kom	Penyusun Bahan Rencana dan Pelaporan	02 / 01 2025	
2.	Diperiksa	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	02 / 01 2025	
3.	Disetujui	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	02 / 01 2025	
4.	Disetujui	Ir. Marvian Dwi Surya Putra_S.SiT., MM	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan	02 / 01 2025	
5.	Disetujui	Dony Prasetio, S.ST.	Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	03 / 01 2025	
6.	Disetujui	Dwi Hary Yulisetianto, S.SiT., M. Sc.	Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	03 / 01 2025	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A. T. D., M.T.

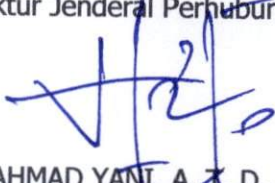
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat


AHMAD YANI, A. T. D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Banjar, 6 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan


SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	80
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.250
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 12.150.246.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 4.117.593.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 21.635.882.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 13.496.560.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.647.028.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 11.020.022.000

Disetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A. T. D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Banjar, 6 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan bermulanya kembali Tahun Anggaran baru 2025 maka dilakukan penyusunan anggaran berdasarkan DIPA NOMOR : SP DIPA- 022.03.2.403855/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dengan Total Anggaran Rp.69.067.331.000,-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rezki Satriya Suherman, S.E.

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

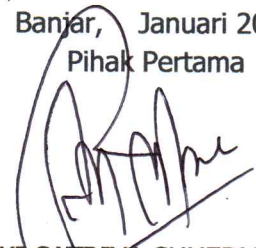
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Banjar, Januari 2025
Pihak Pertama



REZKI SATRIYA SUHERMAN, S.E.
NIP. 19851014 200804 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83



Pihak Kedua

SIGIT MINTARSO

NIP. 19680130 199003 1 001

Banjar, Januari 2025

Pihak Pertama

REZKI SATRIYA SUHERMAN, S.E.
NIP. 19851014 200804 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Marvian Dwi Surya Putra, S.SiT., M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sigit Mintarso

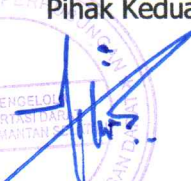
Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

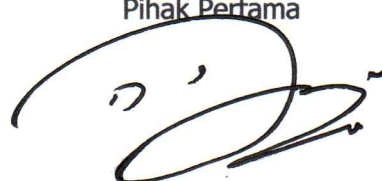
Pihak Kedua



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Banjar, 3 Januari 2025

Pihak Pertama



Ir. MARVIAN DWI SURYA PUTRA, S.SiT., M.M.
NIP. 19850322 200912 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN DAN PENGAWASAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
2	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	1
3	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88

Pihak Kedua


SIGIT MINTARSO
 NIP. 19680130 199003 1 001

Banjar, 3 Januari 2025

Pihak Pertama


Ir. MARVIAN DWI SURYA PUTRA, S.SiT., M.M.
 NIP. 19850322 200912 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dony Prasetyo, S.ST.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Banjar, 3 Januari 2025

Pihak Pertama



DONY PRASETIO, S.ST.
NIP. 19890302 201402 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
2	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88

Pihak Kedua



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Banjar, 3 Januari 2025
Pihak Pertama



DONY PRASETIO, S.ST.
NIP. 19890302 201402 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Hary Yulisetianto, S.SiT., M. Sc.

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 3 Januari 2025

Pihak Pertama

DWI HARY YULISETIANTO, S.SiT., M. Sc.
NIP. 19820720 200312 1 003

Pihak Kedua

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU, dan PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	80
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88

Banjar, 3 Januari 2025

Pihak Kedua



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Pihak Pertama



DWI HARY YULISETIANTO, S.SIT., M. Sc.
NIP. 19820720 200312 1 003

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Kalsel	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	4,833,463,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,829,873,000	Seksi Prasarana
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	4,316,783,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1,087,720,000	Seksi Prasarana

2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	80	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	422,700,000	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	422,700,000	Seksi Prasarana
	3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat																	
		IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan - Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan - Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	12,017,000,000	Seksi Lain
		IKK3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40	- Operasional UPPKB Kintap - Operasional UPPKB Tabalong	3.33	6.66	9.99	13.32	16.65	19.98	23.31	26.64	29.97	33.3	36.63	40	2,812,039,000	Seksi Sarana

		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1250	- Pekan Nasional Keselamatan Jalan - Sadar Lahu Lintas Usia Dini (SALUD)	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	0	0	0	357,143,000	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	7.91	15.82	23.73	31.64	39.55	47.46	55.37	63.28	71.19	79.1	87.01	95	340,050,000	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	Pengadaan Rambu Danau Aranio	0.083	0.166	0.249	0.332	0.415	0.50	0.581	0.664	0.747	0.83	0.913	1	750,000,000	Seksi Lalin
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7.3	14.6	21.9	29.2	36.5	43.8	51.1	58.4	65.7	73	80.3	88	3,793,540,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.91	13.82	20.73	27.64	34.55	41.46	48.37	55.28	62.19	69.1	76.01	83	6,647,028,000	Subbag Tata Usaha

Banjar, 6 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JANUARI TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	8,3	100	4.833.463.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	1. Sudah dilakukan lelang namun belum kontrak kegiatan dikarenakan masih menunggu arahan bagian keuangan 2. Akan segera dilakukan kontrak setelah ada arahan lebih lanjut	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1.829.873.000	100	1	0	0	0,00	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	8,3	100	4.316.783.000	100	8,3	0	100	0,00	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3.Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1.087.720.000	100	4	0	100	0,00	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	80	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM di Terminal Tipe-A	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	7,5	100	422.700.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Akan dilakukan pemenuhan SPM di Terminal Tipe-A	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan	%	80	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	8,3	100	422.700.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Akan dilakukan pemenuhan SPM di Pelabuhan	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Bantuan teknis perlengkapan jalan Perbaikan lokasi rawan kecelakaan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	8,3	100	12.017.000.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	1. Sudah dilakukan lelang namun belum kontrak kegiatan dikarenakan masih menunggu arahan bagian keuangan 2. Akan segera dilakukan kontrak setelah ada arahan lebih lanjut	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	3.33	100	2.812.039.000	100	3.33	0	100	0,00	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1250	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraa n Pekan Keselamatan Nasioanl	1250	100	357.143.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan dibulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Kalibrasi Alat Uji PKB	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	7,91	100	340.050.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	1. Pada Bulan Januari belum ada permohonan masuk kalibrasi alat uji pada dishub kab/kota sekalsel 2. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	0,083	100	750.000.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	1. Sudah dilakukan lelang namun belum kontrak kegiatan dikarenakan masih menunggu arahan bagian keuangan 2. Akan segera dilakukan kontrak setelah ada arahan lebih lanjut	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	7.3	100	3.793.540.000	100	7.3	0	0	0,00	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Pengelolaan bidang ketatausahaan untuk kegiatan rutin: 1. Melakukan Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran 2. Melakukan Penyusunan saki, sip, lkip, profil bptd 3. Melakukan Monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	6.91	100	6.647.028.000	100	6.91	120.000.000	100	1,81	TERCAPAI	Managemen terhadap SDM pegawai BPTD Kalsel	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8									17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	16.06	100	4.833.463.000	100	16.06	2.413.751.600	100	49,94	TERCAPAI	1. Sudah dilakukan telang kontrak kegiatan antara BPTD dengan Perum DAMRI Cab. Banjarmasin pada tgl 24 Februari 2025 dengan Nomor: PL.107/2/11/BPTD-KALSEL/2025 2. Akan dilakukan monitoring ritase disetiap bulannya	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1.829.873.000	100	1	87.972.416	100	4,81	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	16.06	100	4.316.783.000	100	16.06	1.764.897.000	100	40,88	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3.Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1.087.720.000	100	4	143.820.000	100	13,22	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	80	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM di Terminal Tipe-A	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	15	100	422.700.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Akan dilakukan pemenuhan SPM di Terminal Tipe-A	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	15	100	422.700.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Akan dilakukan pemenuhan SPM di Pelabuhan	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan Bantuan teknis perlengkapan jalan Perbaikan lokasi rawan kecelakaan (LRK)	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	16.06	100	12.017.000.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan pengadaan perlengkapan jalan belum dapat dilaksanakan dikarenakan untuk kegiatan sementara terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	6.6	100	2.812.039.000	100	6.66	209.471.269	100	7,45	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1250	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasioanl	1250	100	357.143.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan dibulan September, namun untuk kegiatan sementara terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Kalibrasi Alat Uji PKB	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	15.82	100	340.050.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	1. Pada Bulan Jan-Feb belum ada permohonan masuk kalibrasi alat uji pada dishub kab/kota sekalsei 2. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	0.16	100	750.000.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pengadaan dan pemasangan rambu sungai belum dapat dilaksanakan dikarenakan terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	14.6	100	3.793.540.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan tupoksi DITJEN HUBDAT pada BPTD Kalsel belum dapat dilaksanakan dikarenakan terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	13.82	100	6.647.028.000	100	13.82	1.087.822.381	100	16,37	TERCAPAI	Terlaksananya manajemen terhadap SDM pegawai BPTD Kalsel	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN MARET TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	4.833.463.000	100	9,3	2.413.751.600	9,3	49,94	TERCAPAI	1. Sudah dilakukan lelang kontrak kegiatan antara BPTD dengan Perum DAMRI Cab. Banjarmasin pada tgl 24 Februari 2025 dengan Nomor: PL.107/2/11/BPTD-KALSEL/2025 2. Akan dilakukan monitoring ritase disetiap bulannya	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1.829.873.000	100	1	163.210.593	100	8,92	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	25	100	4.316.783.000	100	25	1.764.897.000	100	40,88	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3.Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1.087.720.000	100	4	154.042.262	100	14,16	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	80	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM di Terminal Tipe-A	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	80	100	422.700.000	100	67.46	0	84.32	0,00	TERCAPAI	Pemenuhan SPM di Terminal Tipe- A telah dilaksanakan pada TW.1	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	80	100	422.700.000	100	56.13	0	70.16	0,00	TERCAPAI	Pemenuhan SPM Pelabuhan telah dilaksanakan	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Bantuan teknis perlengkapan jalan Perbaikan lokasi rawan kecelakaan (LRK)	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	25	100	12.017.000.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan pengadaan perlengkapan jalan belum dapat dilaksanakan dikarenakan untuk kegiatan sementara terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB (Kintap)	10	100	1.433.541.000	100	10	152.884.133	100	10,66	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1250	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasioanl	1250	100	357.143.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan dibulan September, namun untuk kegiatan sementara terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Kalibrasi Alat Uji PKB	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	23.73	100	340.050.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	1. Pada Bulan Jan-Mar telah ada permohonan masuk kalibrasi alat uji pada dishub kab/kota sekalsel namun, permohonan tersebut belum bisa diindaklanjuti karena terdampak efisiensi anggaran 2. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	0.24	100	750.000.000	100	0	0	0	0,00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pengadaan dan pemasangan rambu sungai belum dapat dilaksanakan dikarenakan terkena dampak efisiensi sehingga kegiatan terblokir	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	88	100	3.793.540.000	100	80	166.742.250	90,90	4,40	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Pengelolaan bidang ketatausahaan untuk kegiatan rutin: 1. Melakukan Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran 2. Melakukan Penyusunan saking, sipip, lkip, profil bptd 3. Melakukan Monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	83	100	6.647.028.000	100	76.62	2.229.660.131	92.31	33,54	TERCAPAI	Terlaksananya manajemen terhadap SDM pegawai BPTD Kalsel	Subbag Tata Usaha